

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2019



MELALUI EVALUASI KINERJA  
KITA TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF  
UNTUK OBAT DAN MAKANAN  
YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING  
DI ERA INDUSTRI 4.0

SHANGRI-LA HOTEL SURABAYA 12 NOVEMBER 2019



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



## KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.



Sebagai salah satu Satuan Kerja di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Tahun 2019 ini adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2015 – 2019. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat menyajikan pencapaian sasaran strategis Renstra Sekretariat Utama dan dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2020

Plt. Sekretaris Utama,



Dr. Rita Endang Apt, M.Kes

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vii
<i>Milestone</i> Sekretariat Utama Tahun 2019 .....	ix
Bab I. Pendahuluan.....	1
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	17
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	25
Bab IV. Penutup .....	89

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	19
Tabel 2.	Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2019.....	22
Tabel 3.	Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran.....	23
Tabel 4.	Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2019.....	25
Tabel 5.	Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2019 .....	26
Tabel 6.	Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2019.....	28
Tabel 7.	Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2019 .....	40
Tabel 8.	Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2019 .....	42
Tabel 9.	Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2019.....	50
Tabel 10.	Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2019 .....	53
Tabel 11.	Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2019.....	58
Tabel 12.	Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2019 .....	60
Tabel 13.	Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2019 .....	63
Tabel 14.	Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2019 .....	66
Tabel 15.	Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2019.....	69
Tabel 16.	Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2019.....	72
Tabel 17.	Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2019 .....	77
Tabel 18.	Realisasi Keuangan Sekretariat Utama Tahun 2019 Per Program.....	81
Tabel 19.	Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tahun 2019.....	82
Tabel 20.	Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2019.....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama .....	4
Gambar 2. Demografi Pegawai per unit eselon II .....	5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama berdasarkan Golongan .....	5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama berdasarkan Tingkat Pendidikan ....	6
Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama berdasarkan Usia.....	6
Gambar 6. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Utama .....	17
Gambar 7. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama.....	18
Gambar 8. Kerangka Logis Evaluasi RB .....	29
Gambar 9. Tampilan Pohon Kinerja Sekretariat Utama.....	80

Halaman ini sengaja dikosongkan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Satuan kerja di BPOM yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan Sekretariat Utama 2015-2019, telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu: 1) "Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019" tercapai dengan kategori Baik (98,85%); 2) "Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik" tercapai dengan kategori Baik (107,58%); 3) "Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen" tercapai dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (132,16%); 4) "Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM" tercapai dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (131,08%); 5) "Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama" tercapai dengan kategori Baik (99,44%); 6) "Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu" tercapai dengan kategori Baik (100%); 7) "Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM" tercapai dengan kategori Baik (109,04%); 8) "Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran" tercapai dengan kategori Baik (100%); 9) "Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum" tercapai dengan kategori Baik (100%); 10) "Meningkatnya kerja sama BPOM" tercapai dengan kategori Baik (111,13%); 11) "Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen" tercapai dengan kategori Sangat Baik (115,11%); serta 12) "Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019" tercapai dengan kategori Baik (96,73%).

Dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Sekretariat Utama, 2 (dua) Indikator Kinerja telah mencapai target 110-120% di tahun 2019 dengan kategori pencapaian Sangat Baik, yaitu 1) Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik, dengan capaian 115,21%; 2) Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM, dengan capaian 114,46%. Kemudian 12 (dua belas) Indikator Kinerja telah mencapai target 90-110% di tahun 2019 dengan kategori pencapaian Baik, yaitu Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan, dengan capaian 98,27%; 2) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dengan capaian 100%; 3) Nilai Pengelolaan BMN BPOM, dengan capaian 107,58%; 4) Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama, dengan capaian 99,44%; 5) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%; 6) Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan capaian 96,68%; 7) Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi dengan capaian 100%; 8) Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun dengan capaian 100%; 9) Persentase advokasi hukum yang

diselesaikan dengan capaian 100%; 10) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM dengan capaian 111,13%; 11) Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung, dengan capaian 102,85%; serta 12) Nilai AKIP Sekretariat Utama, dengan capaian 96,73%. Sedangkan 3 (tiga) Indikator Kinerja mencapai target dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan karena capaiannya lebih 120%, yaitu 1) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen; 2) Indeks Opini Publik BPOM; dan 3) Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1, diperoleh capaian yang melebihi target yaitu masing-masing sebesar 132,16%, 131,08% dan 128,03%.

Pada tahun 2019, pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019 adalah Rp359.611.361.000,-. Kemudian pada bulan Oktober 2019 Sekretariat Utama memperoleh tambahan anggaran dari BA BUN dan Satuan Kerja lain sebesar Rp22.560.919.000,- untuk Gaji dan Tunjangan Kinerja. Kemudian pada bulan November memperoleh tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.566.051.000,- untuk Pembangunan Gedung sehingga total anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp386.738.331.000,-. Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp379.075.701.650,- (98,02%) dari total pagu.

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program “Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen” yaitu sebesar 59,66%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung dan layanan internal (overhead) dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Melakukan reviu target indikator untuk indikator yang tidak dapat disimpulkan pada Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.
2. Menyusun metode survei indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang sama untuk kelima Biro di Sekretariat Utama.
3. Membuat mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang up to date, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, sistematis dan mampu ditelusur.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

## **MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019**



Penghargaan TOP 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Penghargaan Piala Anggakara Birawa Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Piala Anggakara Birawa yaitu penghargaan yang diberikan bagi TOP 10 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik sebagai Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik.



Penghargaan TOP 10 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Sebagai Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPOM berhasil memperoleh penghargaan ini selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019.



Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik “Menuju Informatif Tahun 2019 dari Komisi Informasi Pusat sebagai hasil penilaian *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi BPOM. BPOM berhasil memperoleh penghargaan ini selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019.



Agent Contact Center HaloBPOM 1500533 telah berhasil meraih *Bronze Medal The Best Agent Lembaga Publik* untuk pertama kalinya pada ajang *The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2019*. Ajang ini upaya mendorong peningkatan kompetensi dan memotivasi peningkatan kinerja pelayanan prima oleh petugas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan.



Penghargaan atas Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dari ANRI



The Most Innovative Institution dalam Penilaian Instansi Pembina Jabatan Fungsional Terbaik Tahun 2019 dari Kementerian PAN dan RB



BPOM memperoleh peringkat 3 besar (kategori AA /Sangat Memuaskan) terkait Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan seluruh Kementerian/ Lembaga dari ANRI



Sertifikat ISO 9001:2015 Tahun 2019 untuk Manajemen Puncak BPOM, 28 Unit Kerja Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM dan 2 Loka POM di Kabupaten/Kota.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:



### Biro Kerja Sama

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan obat dan makanan, dan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

F  
U  
N  
G  
S  
I

### Biro Hukum dan Organisasi

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan evaluasi hukum
3. Pelaksanaan advokasi hukum
4. Penataan organisasi dan tata laksana
5. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

F  
U  
N  
G  
S  
I

### Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtangaan, perencanaan dan pengelolaan karir dan kinerja sumber daya manusia, dan urusan persuratan dan kearsipan

1. Pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa
2. Pelaksanaan urusan kerumahtangaan
3. Perencanaan dan pengelolaan karir dan sumber daya manusia
4. Pengelolaan kinerja sumber daya manusia
5. Pengelolaan persuratan dan kearsipan

F  
U  
N  
G  
S  
I

**Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan**

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan pengelolaan hubungan Masyarakat, komunikasi, publikasi, pengaduan Masyarakat, koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, keprotokolan, dan urusan kesekretariatan pimpinan

F  
U  
N  
G  
S  
I

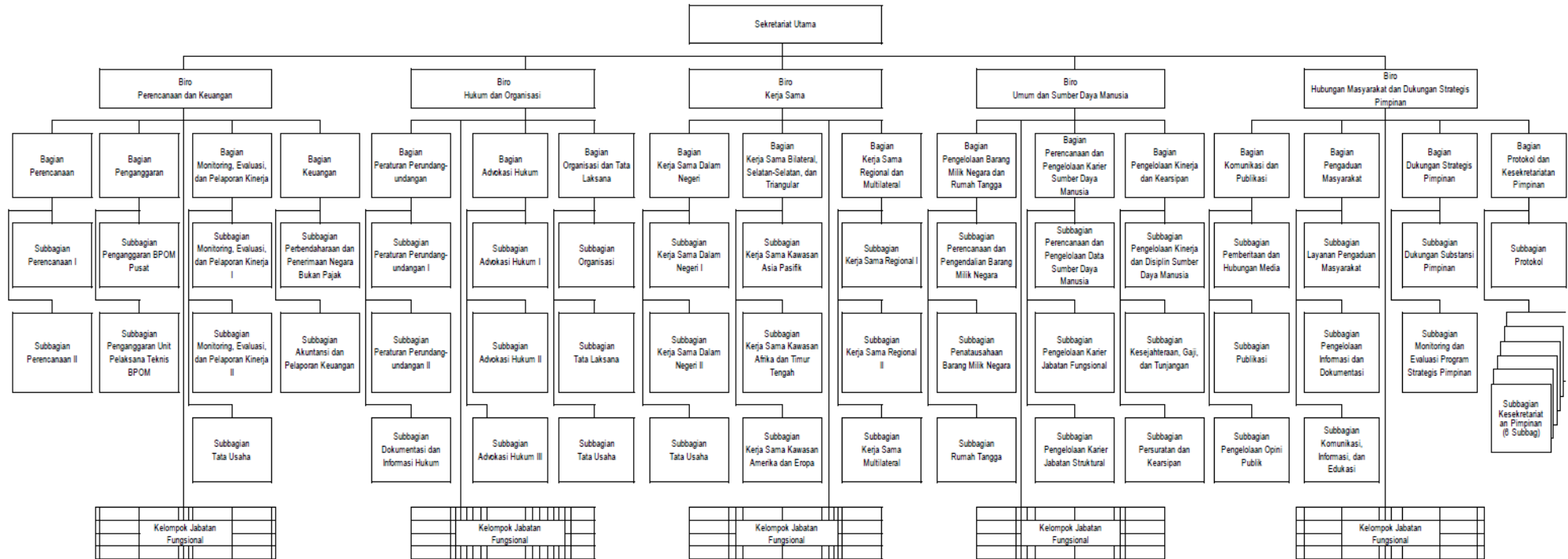
1. Pengelolaan hubungan Masyarakat, komunikasi, dan publikasi
2. Pengelolaan pengaduan Masyarakat
3. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang pengawasan obat dan makanan
4. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, dan
5. Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membawahi unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretariat Utama, antara lain:

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM)

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

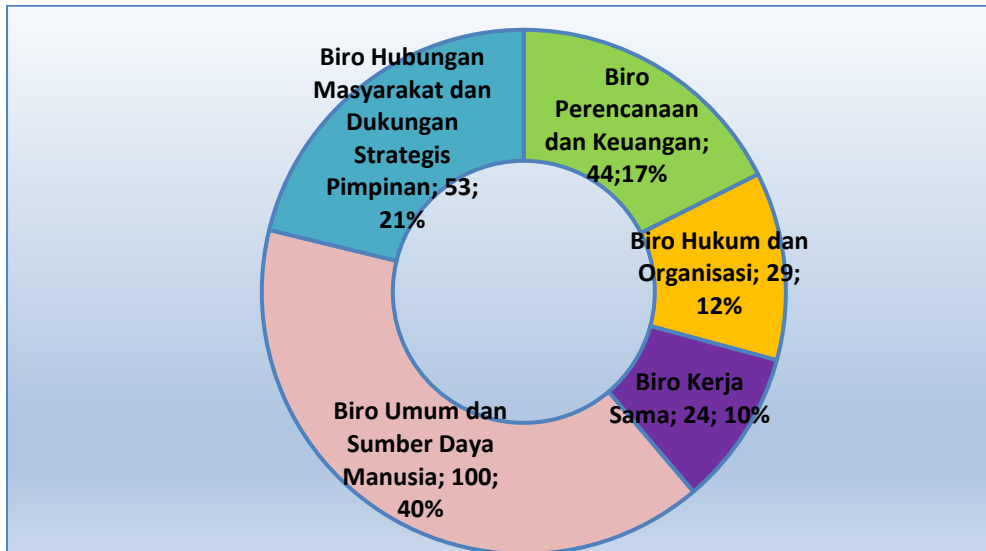
**Bagan Organisasi Sekretariat Utama**



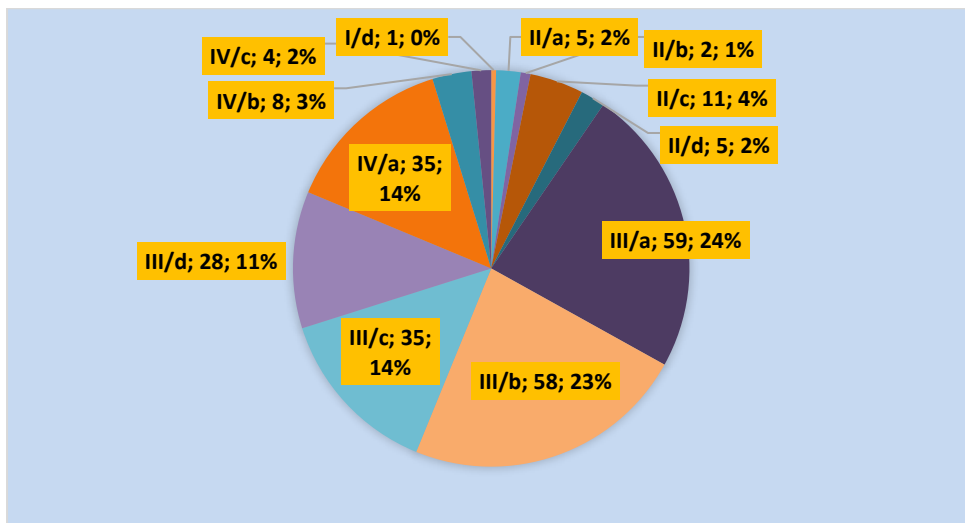
**Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama**

**B. SUMBER DAYA MANUSIA**

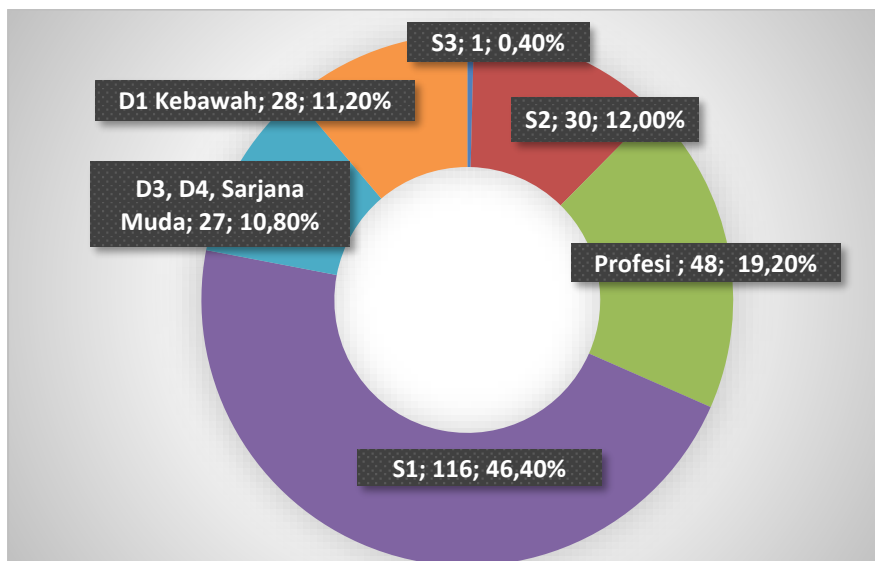
Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian Jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal 14 Januari 2020 adalah sebanyak 250 orang. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:



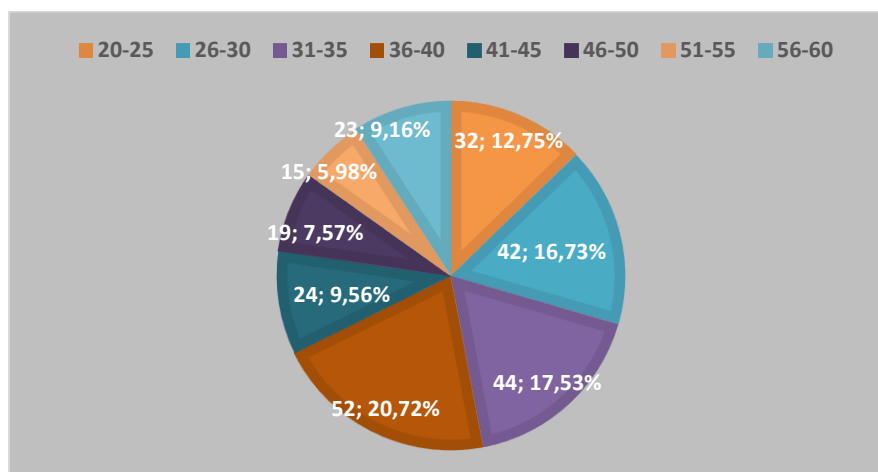
**Gambar 2. Demografi Pegawai Per unit Eselon II**



**Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Golongan**



Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Usia

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) :

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Existing	Jumlah Kebutuhan (ABK)
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	44	89
2	Biro Hukum dan Organisasi	29	57
3	Biro Kerja Sama	24	59
4	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	100	302
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	53	141
TOTAL		250	648

### C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan *Human Capital Management*.

BPOM memiliki SDM dengan kompetensi dan variasi latar belakang pendidikan yang memadai, namun dari sisi kuantitas belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sistem manajemen Pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk itu perlu diterapkan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien seperti evaluasi terhadap analisis beban kerja, analisis jabatan setiap tahun sehingga diperoleh peta jabatan yang termutakhir untuk penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan SDM serta reviu kelas jabatan tertentu.

Telah dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM antara lain dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, penyusunan manajemen talenta, penyusunan kurikulum diklat teknis pembentukan dan berjenjang. Dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta, BPOM menyiapkan Standar Kompetensi Jabatan sesuai Jabatan yang terdapat di BPOM, melakukan pemetaan kompetensi untuk memperoleh profil kompetensi SDM BPOM dan melakukan pengembangan kompetensi para calon suksesi kepemimpinan masa datang. Kondisi saat ini, Standar Kompetensi sesuai Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara masih dalam proses verifikasi dan validasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai saat ini telah disusun 115 dokumen sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM di BPOM.

#### 2. Penguatan Kelembagaan

##### A. Pembentukan Pos POM di Sumba Timur

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai 73 (tujuh puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, pada wilayah kerja UPT BPOM dapat dibentuk unit organisasi nonstruktural Pos Pengawas Obat dan Makanan (Pos POM). Sesuai

perkembangan dan kebutuhan organisasi, diperlukan pembentukan Pos POM di Sumba Timur pada wilayah kerja UPT Balai POM di Kupang dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Pos POM di Sumba Timur mendapatkan rekomendasi tertulis dari Anggota Komisi IX DPR RI dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, ditetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.22.09.19.3521 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pos Pengawas Obat dan Makanan di Sumba Timur. Wilayah kerja Pos POM di Sumba Timur meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah.

B. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja UPT melalui penyusunan:

- a. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Penataan OTK BPOM merupakan dampak dari pembentukan 3 (tiga) UPT di lingkungan P3OMN BPOM. Ruang lingkup perubahan meliputi:
  - 1) penyesuaian tugas dan fungsi pengujian dan penindakan yang diselenggarakan oleh UPT Balai Besar, Balai, dan Loka POM sebagai berikut:
    - a) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
    - b) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
    - c) pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
  - 2) perubahan Lampiran Lokasi dan Wilayah Kerja UPT di Lingkungan BPOM di antaranya Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat diubah menjadi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan nomenklatur Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara

Barat menjadi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku

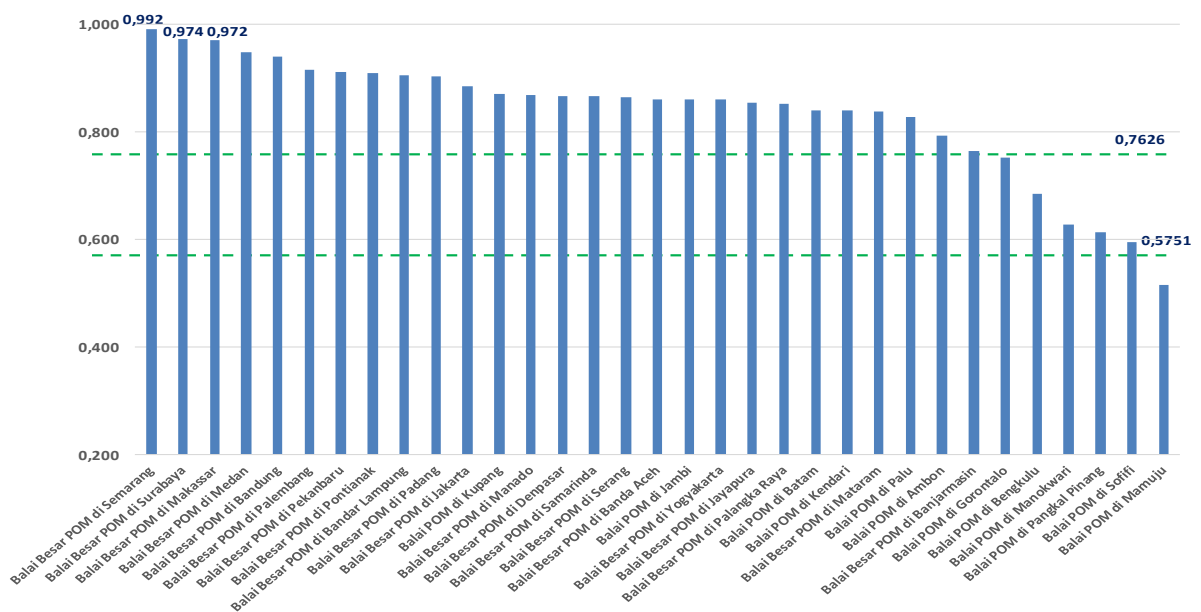
b. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Peraturan BPOM ini merupakan dasar pembentukan 3 (tiga) UPT di lingkungan P3OMN BPOM, terdiri atas:

- 1) Balai Pengujian Produk Biologi;
- 2) Balai Kalibrasi;
- 3) Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

C. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Klasifikasi UPT BPOM

Penilaian/evaluasi klasifikasi UPT BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Hasil penilaian/evaluasi klasifikasi UPT BPOM perlu dilakukan monitoring secara berkala sebelum dilakukan evaluasi pada tahun 2020. Monitoring dan evaluasi penilaian klasifikasi UPT BPOM dilakukan terhadap 73 UPT BPOM, terdiri dari 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM. Hasil monitoring dan evaluasi penilaian klasifikasi UPT BPOM sebagai berikut:

**UPT Balai Besar/Balai POM**





### 3. Peningkatan Pelayanan Publik.

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi Pemerintah merupakan “pelayan Masyarakat”, BPOM senantiasa membenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Peningkatan layanan publik terhadap dunia usaha dilakukan melalui: (1) debirokratisasi dan deregulasi; (2) peningkatan pelayanan prima termasuk sarana prasarana; dan (3) pengembangan teknologi informasi.

BPOM telah merancang inovasi baru berupa modul-modul baru untuk memenuhi debirokratisasi dan deregulasi dalam sistem informasi diantaranya *e-Registration* (contoh: *renewal* tanpa perubahan pada obat, *clustering* pada obat tradisional dan suplemen kesehatan), e-sertifikasi (GMP, termasuk CPOTB bertahap untuk UMKM), pemasukan obat dan makanan (e-BPOM, termasuk SAS serta SKE untuk CPOB produk ekspor), pengajuan protokol pra klinik dan uji klinik ([sipuko.pom.go.id](http://sipuko.pom.go.id)), serta layanan publik laboratorium ([sipoon.pom.go.id](http://sipoon.pom.go.id)).

Sejalan dengan amanat Presiden dalam kemudahan berusaha, setiap layanan secara bertahap telah terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*), pembayaran satu pintu dengan SIMPONI, dan tanda tangan bersertifikat BsrE (Balai Sertifikat Elektronik).

Selain hal tersebut, masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pengaduan juga diberikan kemudahan akses melalui aplikasi BPOM *Mobile*. Dengan BPOM *Mobile* ini masyarakat dapat melakukan verifikasi keabsahan produk dan dapat menyampaikan laporan ketika menemukan kecurigaan terkait legalitas produk dengan menggunakan satu aplikasi yang sama. Pada Tahun 2019, meneruskan pilot project WHO terkait pelaporan obat tidak memenuhi standar serta palsu, dikembangkan pula pelaporan khusus dari tenaga kesehatan di aplikasi BPOM *Mobile* ini.

### 4. Peningkatan jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektoral. Untuk itu BPOM mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait (K/L, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi, *e-commerce*, pramuka, dll), baik di dalam maupun luar negeri. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM bersinergi dengan program dan kewenangan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Selain peningkatan jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri, BPOM juga memberikan bantuan penguatan fungsi regulatori pengawasan Obat dan Makanan di negara selatan-selatan yang telah dilaksanakan melalui program Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) dengan negara: Timor Leste, Papua Nugini, Yordania dan Palestina. Bantuan ini mendapat sambutan positif dari instansi penerima, khususnya Kementerian Kesehatan Palestina. Secara khusus, Menteri Palestina meminta bantuan BPOM dalam pembentukan Badan Otoritas Obat dan Makanan Palestina. Selain bantuan teknis berupa peningkatan kapasitas regulatori, BPOM juga menggalang bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina.

5. Penguatan akuntabilitas melalui penguatan pengawasan internal.

Agar akuntabilitas pelaksanaan anggaran dibutuhkan perkuatan pengawasan internal dan pendampingan kepada unit kerja oleh Inspektorat BPOM.

6. Penguatan pengawalan pembentukan dan implementasi regulasi.

Saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi pengawasan terhadap produk obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan pangan olahan. Pelaksanaan pengawasan untuk obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik yang merupakan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut. Untuk Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi belum ada payung hukum yang mengatur secara jelas karena belum diatur masuk dalam lingkup sediaan farmasi.

Adanya berbagai tantangan yang dihadapi memerlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

- a. membangun sumberdaya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing;

- b. tersedianya sistem pengawasan yang lebih kuat *pre market* dan *post market* untuk mendukung pengembangan industri obat dan makanan yang tangguh dan berdaya saing untuk ekspor;
- c. membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen, untuk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu; dan
- d. penguatan fungsi penegakan hukum untuk kejahatan di bidang pengawasan Obat dan Makanan guna menimbulkan efek jera.

RUU ini merupakan inisiatif DPR dan bentuk komitmen Pemerintah yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Illegal dan Penyalahgunaan Obat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017. DPR telah menyampaikan RUU POM tersebut kepada Presiden dengan Surat Nomor LG/11923/DPR RI/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019. Pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut dan telah disampaikan kepada DPR pada tanggal 27 September 2019. Berdasarkan hal tersebut RUU POM dapat *carry over* dan telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sudah dalam proses revisi/pencabutan dimana BPOM sebagai inisiator yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tersebut telah selesai dibahas antar kementerian (PAK) dan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta telah diajukan proses paraf oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat nomor B-1131/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Permintaan Paraf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sudah seharusnya dicabut dan ditetapkan yang baru karena sudah tidak relevan lagi dan sesuai dengan amanah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan bahwa BPOM dan Kementerian Kesehatan harus memperbaiki bisnis proses terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka meningkatkan antara lain ekosistem investasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta percepatan proyek Pemerintah telah menetapkan

rancangan Undang Undang tentang Omnibus Law yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020. BPOM masuk dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan terkait dengan 3 (tiga) klaster yaitu penyerdehanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dan penerapan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor Omnibus Law yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tentang Pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, perizinan tersebut harus terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perizinan terintegrasi secara elektronik tersebut maka Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 dan Nomor 27 Tahun 2018 akan dilakukan penyesuaian.

Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut.

7. Peningkatan pemberian advokasi hukum terhadap kasus-kasus di lingkungan BPOM.

Sekretariat Utama memberikan advokasi hukum, melakukan mediasi termasuk menangani perkara yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerja sama perdagangan lintas batas dan *Free Trade Zone Area*.

#### 8. Penguatan *e-Government*

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dilakukan melalui penerapan *e-Government* atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM. Penerapan *e-government* diterapkan baik pada terhadap layanan publik ataupun layanan internal Badan POM.

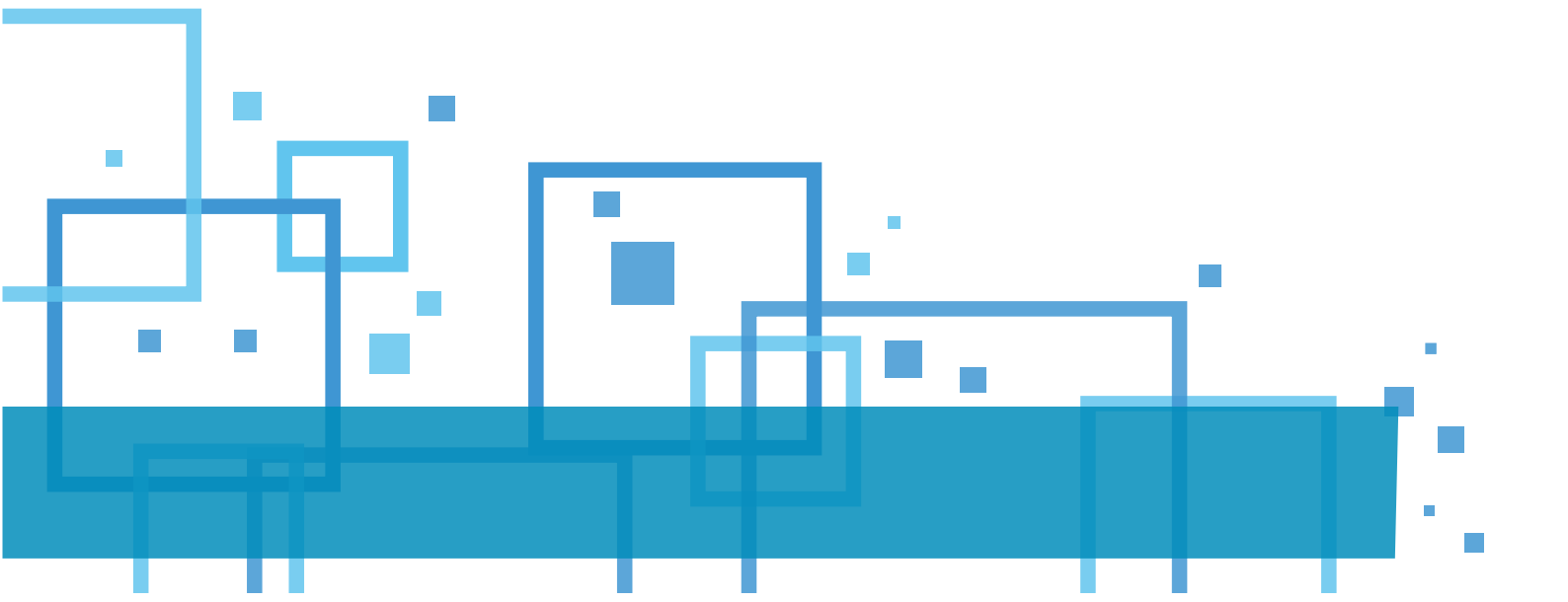
Penguatan layanan publik melalui otomatisasi seluruh layanan public melalui teknologi informasi dari *e-registrasi*, *e-sertifikasi*, sipuko (uji klinik), serta sipopon (layanan laboratorium). Dimana setiap layanan publik ini terintegrasi dengan OSS, Simponi serta Tanda Tangan elektronik bersertifikat BSRe.

Penguatan kelembagaan melalui *e-government* juga dikembangkan dalam pemantauan internal pengawasan Badan POM, seperti SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), yang meliputi pelaporan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana, serta pemeriksaan penandaan dan iklan. Dalam peningkatan SDM juga dikembangkan sipandai.pom.go.id sebagai *knowledge management* dan peningkatan kompetensi bagi seluruh SDM di Badan POM. Selain itu telah dikembangkan pula aplikasi layanan kepegawaian (siasn.pom.go.id), yang memuat diantaranya adalah data kepegawaian, *e-cuti*, *e-SKP*, LHKSN, tugas belajar serta dosir. Pada tahun 2019 telah dilakukan *updating database* seluruh pegawai BPOM yang terintegrasi dengan aplikasi layanan kepegawaian, melakukan integrasi antar aplikasi layanan kepegawaian seperti aplikasi SISFO, pengembangan fitur *report* pada aplikasi database SIAP, serta pengembangan aplikasi *e-SKP* dan *e-Tukin*.

#### 9. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja.

Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar baik laboratorium, gedung layanan publik, fasilitas pendukung lain seperti penataan luar lingkungan kantor, renovasi gedung kantor, pembangunan gedung kantin, pembangunan gudang, lahan parkir yang memadai, peremajaan jaringan listrik dan air, pembangunan hydrant yang terintegrasi dan drainase, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling akan memudahkan BPOM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan draft Peraturan Badan POM tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Keamanan di Lingkungan Badan POM yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan antara Biro Umum dan SDM bersama Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu disusun juga draft Peraturan Badan POM tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan POM yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

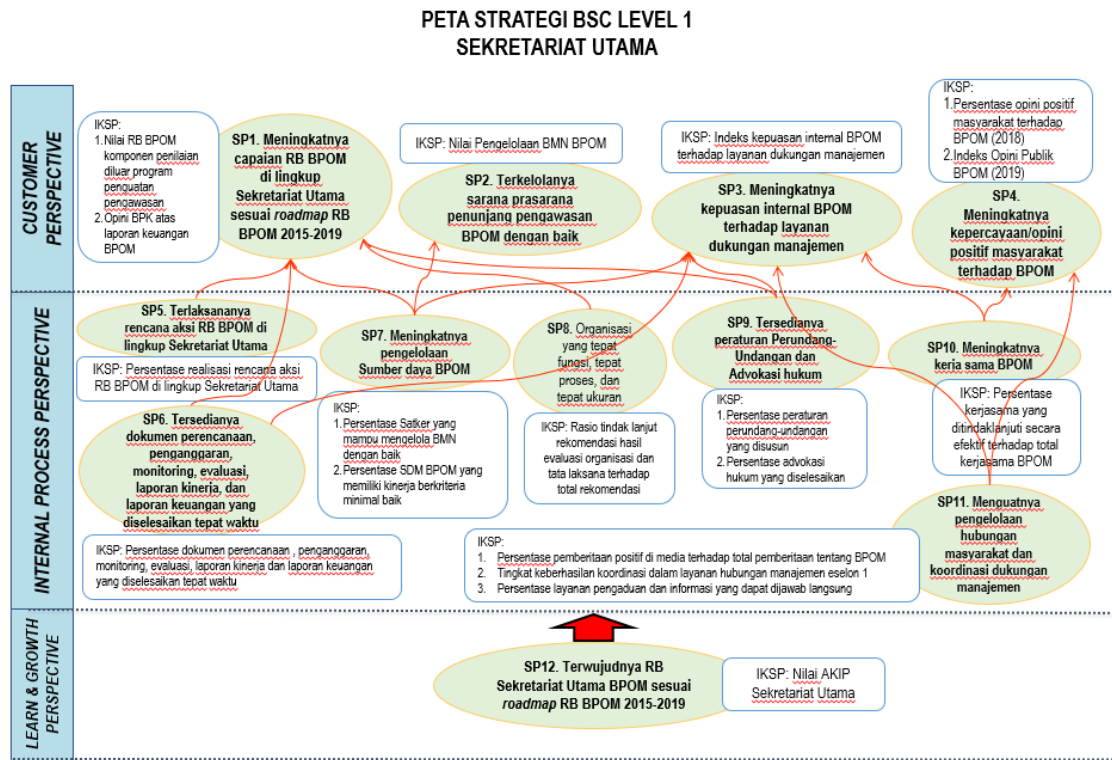
Penyusunan Kinerja di tahun 2019 dimulai dari melihat ulang dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2015-2019 dan Renstra Sekretariat Utama 2015-2019.

Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:



Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Dalam penyusunan sasaran Program, Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



**Gambar 7. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama**

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

## II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

### A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan

keepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019. Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 3 Januari 2019. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan ketiga sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	54,3
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	61
Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	Indeks Opini Publik BPOM	65%
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100%
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89%
	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85%
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71%
Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87%
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	61
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93%
Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan melalui aplikasi secara online yaitu *e-Performance* BPOM dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan (*e-monev* Bappenas versi 3.0) berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

## B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2019, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp359.611.361.000,-. Pada bulan Oktober 2019 Sekretariat Utama memperoleh tambahan anggaran dari BA BUN dan Satuan Kerja lain sebesar Rp22.560.919.000,- untuk Gaji dan Tunjangan Kinerja. Kemudian pada bulan November memperoleh tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.566.051.000,- untuk Pembangunan Gedung sehingga total

anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp386.738.331.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 6 kegiatan utama yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

No.	Program	Semula (Rp)	Revisi (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	291.143.360.000	313.704.279.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	68.468.001.000	73.034.052.000
	<b>Total</b>	<b>359.611.361.000</b>	<b>386.738.331.000</b>

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 6 (enam) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan utama antara lain:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM yang didukung oleh 5 (lima) kegiatan utama yaitu:
  - a. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM.
  - b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
  - c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana.
  - d. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan.
  - e. Pengelolaan SDM BPOM.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan utama yaitu:
  - a. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM.

Berikut anggaran Sekretariat Utama untuk mendukung capaian sasaran program:

**Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2019**

Program/Sasaran Program	Pagu
<b>A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>	<b>313.704.279.000</b>
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	16.153.028.000
2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	1.384.303.000
3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	230.742.468.000
4. Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	11.108.529.000
5. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	4.402.061.000
6. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	11.924.929.000
7. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10.027.133.000
8. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	2.440.253.000
9. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	6.532.246.000
10. Meningkatnya kerja sama BPOM	6.636.140.000
11. Mekuatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	7.522.198.000
12. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	4.830.991.000
<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>	<b>73.034.052.000</b>
a. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	73.034.052.000

### III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:







$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran**

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	$50\% \leq \chi < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq \chi < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq \chi < 110\%$	Baik
	$110\% \leq \chi < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2015-2019. Laporan kinerja tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2019 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi yang dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa indikator sasaran program yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direviu.

#### 1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

**Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2019**

<i>PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM</i>	NPS	KRITERIA
<b>A. <i>Customer Perspective</i></b>	117,42	Sangat Baik
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	98,85	Baik
2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	107,58	Baik
3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	132,16	Tidak Dapat Disimpulkan
4. Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	131,08	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>B. <i>Internal Process Perspective</i></b>	104,96	Baik
5. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	99,44	Baik
6. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100,00	Baik

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

<i>PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM</i>	NPS	KRITERIA
7. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	109,04	Baik
8. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	Baik
9. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	100,00	Baik
10. Meningkatnya kerja sama BPOM	111,13	Baik
11. Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	115,11	Sangat Baik
<b>C. Learning and Growth Perspective</b>	96,73	Baik
12. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	96,73	Baik

NPS tahun 2019 sebesar 106,37 (Sangat Baik). Nilai ini terbentuk dari agregasi realisasi kinerja indikator-indikator turunannya atau pembentuknya dibandingkan terhadap angka target dalam satu tahun.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2019 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2019**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>Customer Perspective</i>							
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	1	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	-	54,3	53,36	98,27
		2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	72	77,46	107,58
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	61	80,62	132,16

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	5	Indeks Opini Publik BPOM	%	65	85,20	131,08
<b>Internal Process Perspective</b>							
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	6	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	%	100	99,44	99,44
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	8	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	89	86,05	96,68
		9	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	%	85	97,93	115,21
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	10	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	%	100	100	100
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	11	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100
		12	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	%	100	100	100
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	13	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	%	71	78,90	111,13
11	Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	%	87	99,58	114,46
		15	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	61	78,1	128,03
		16	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	%	93	95,65	102,85
<b>Learning and Growth Perspective</b>							

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	17	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	81	78,35	96,73

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019</b>
<b>IKU</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan</li> <li>2. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM</li> </ol>	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

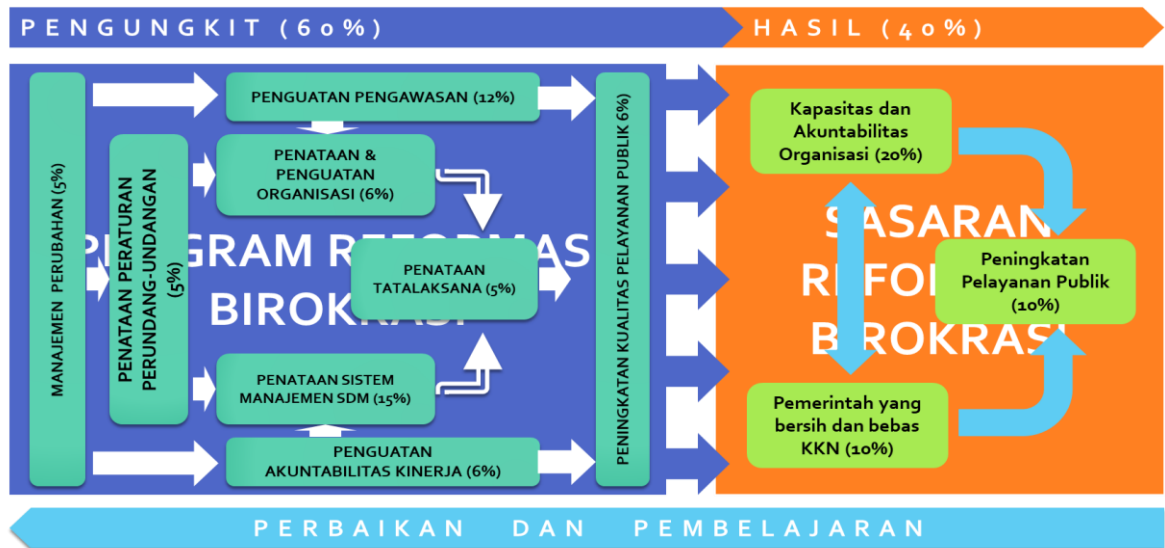
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2019

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	54,3	54,3	53,36	98,27	98,27	51,9	51,28	98,81	-	50,27	-	-	49,25	-	-	-	-
2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan” adalah 53,36 dari target 54,3, sehingga capaian indikator adalah 98,27%.

Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan dihitung berdasarkan penilaian RB yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB untuk Komponen Penilaian (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dan Komponen Hasil (Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Survei Internal Integritas Organisasi) berdasarkan hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kementerian PANRB.

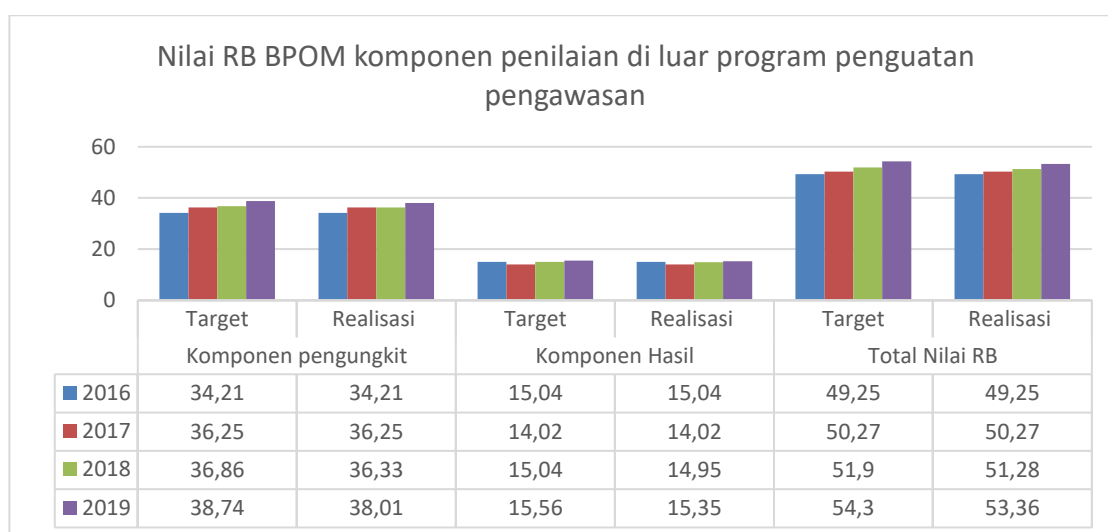
Cara perhitungan indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian di luar program penguatan pengawasan adalah hasil evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB untuk komponen pengungkit (proses), meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian lembar kerja evaluasi pelaksanaan RB. Sedangkan komponen hasil meliputi nilai akuntabilitas kinerja dan survei internal integritas organisasi.



Gambar 8. Kerangka Logis Evaluasi RB

Nilai RB BPOM komponen penilaian di luar program penguatan pengawasan tahun 2019 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator	2019		
		T	R	%
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>38.74</b>	<b>38.01</b>	<b>98.12</b>
1	Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	3.92	3.87	98.72
2	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3.00	3.2	106.67
3	Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	4.30	4.32	100.47
4	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	4.30	4.12	95.81
5	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13.45	13.1	97.40
6	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5.00	4.86	97.20
7	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4.77	4.54	95.18
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>	<b>15,56</b>	<b>15.35</b>	<b>98.65</b>
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	11.96	10.75	89.88
2	Survei Internal Integritas Organisasi	3.60	4.6	127.78
<b>Total</b>		<b>54.30</b>	<b>53.36</b>	<b>98.27</b>



Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 53,36 (98,27%) dari target 54,30. Capaian 2019 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 dengan capaian 51,28. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kemenpan RB, beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- a. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM tahun 2020-2024 yang terintegrasi dengan Renstra BPOM 2020-2024 serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;
- b. Berdasarkan data hasil survey integritas jabatan, terdapat 36,11% pegawai yang masih perlu dibimbing karena masih tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan tidak memahami ukuran keberhasilan tugas fungsi tersebut. 38,89% pegawai telah memahami tugas fungsi namun belum memahami ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas fungsi dan perjanjian kinerjanya. Hanya sebesar 25,00% yang memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan sesuai tugas fungsi pada jabatannya. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam uraian tugas (*job description*) demikian halnya dengan perjanjian kinerja serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud;
- c. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di BPOM kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola di lingkungan BPOM;
- d. Meningkatkan peran “agen perubahan” di setiap unit kerja untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, akan tetapi mampu membangun *social control* diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;
- e. Reviu dan analisis mekanisme evaluasi kebijakan untuk lebih memastikan efektivitas suatu kebijakan serta relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi;
- f. Mengoptimalkan dan memonitoring pembangunan media-media *e-Government* yang sudah ada sehingga dapat digunakan secara efektif oleh seluruh unit kerja baik yang berada di pusat maupun yang di daerah;
- g. Melakukan reviu atas ukuran kinerja yang digunakan oleh BPOM pada seluruh area yang ada terutama yang dilaksanakan dengan metode sampling. Reviu bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah sampling sudah dapat menggambarkan populasi ukuran kinerja yang akan digunakan pada seluruh wilayah di Indonesia;
- h. Secara terus menerus mendorong penciptaan inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Kegiatan tahun 2019 yang menunjang pencapaian indikator dan upaya peningkatan tahun 2019 antara lain :

1. Manajemen Perubahan

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melakukan penyusunan strategi komunikasi perubahan dan kebijakan pimpinan BPOM dan setiap agen perubahan harus membuat rencana tindak berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya, maka tindak lanjut yang dilakukan tahun 2019 antara lain:

- a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan RB unit kerja.
- b. Penyusunan Buku Agenda Perubahan RB BPOM Tahun 2019.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan Program quick wins BPOM 2019 serta evaluasi dan pelaporan quick wins 2018.
- d. Tinjau ulang Road Map RB BPOM Tahun 2015-2019.
- e. Sosialisai Pedoman dan Internalisasi RB kepada pimpinan unit kerja.
- f. Sosialisasi survei opini pegawai dalam rangka peningkatan engagement pegawai BPOM.
- g. Penyusunan Road map *engagement* pegawai BPOM.
- h. Pelatihan Asesor PMPRB dan monev RB serta auditor Internal QMS unit kerja.
- i. Pembangunan aplikasi E-monev RB.
- j. Mendorong munculnya inovasi pelayanan di unit kerja.
- k. FGD dan internalisasi nilai (value) Organisasi dan Agenda Perubahan RB melalui strategi komunikasi internal dan peningkatan peran agen perubahan.
- l. Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM.
- m. FGD Agen Perubahan BPOM.
- n. Pengembangan sub domain BPOM.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui program Manajemen Perubahan, antara lain:

- a. Penyusunan Roadmap RB 2020-2024 sebagai panduan dan penunjuk arah dalam pelaksanaan RB Badan POM.

- b. Perubahan *mind set* dan *culture set* melalui optimalisasi peran agen perubahan, khususnya penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi agen perubahan yang berfokus pada Internalisasi RB dan Internalisasi Budaya Organisasi Badan POM.
  - c. Peningkatan kualitas Monev RB Badan POM melalui pembangunan Aplikasi Monev RB Badan POM.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Dalam upaya melakukan penataan peraturan perundang-undangan BPOM telah melaksanakan pengkajian/analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan BPOM sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undang di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Target yang ingin dicapai dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dengan indikator harmonisasi dan sistem pengendalian peraturan di bidang obat dan makanan, melalui kegiatan:
- a. Evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan yang meliputi, harmonisasi, simplifikasi, deregulasi dan revisi.
  - b. Perencanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.
  - c. Penyusunan Peraturan perundang-undangan.
  - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  - e. Monitoring dan evaluasi pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
- Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melakukan pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik, maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:
- a. Pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik dibangun bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi unit organisasi di lingkungan BPOM tahun 2020.
  - b. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

- c. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui:

- a. Penataan kelembagaan Unit Kerja BPOM Pusat dan UPT dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sesuai arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.
- b. Pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

#### 4. Penataan tatalaksana

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melalui: (1). integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017 dan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju dan 2 (dua) Loka POM yang baru dibentuk, (2). Elektronisasi pemberian nomor surat dan implementasi Sistem Informasi kearsipan Dinamis di lingkungan BPOM, maka tindak lanjut yang dilakukan tahun 2019 antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan Manual Organisasi BPOM yang terintegrasi antara ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017;
- b. Pelaksanaan Manual Organisasi yang terintegrasi akan dilaksanakan pada Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Kepala BPOM.
- c. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju dan 2 Loka POM yang baru dibentuk yaitu Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang yang telah dilaksanakan pada audit resertifikasi bulan Agustus sampai dengan September 2019.
- d. Tinjau Ulang Bisnis Proses BPOM yaitu Peta Proses Bisnis, Peta Subproses Bisnis, Peta Lintas Fungsi dan SOP Makro BPOM.

- e. Audit Internal QMS ISO 9001:2015 BPOM untuk Manajemen Puncak, 28 Unit Kerja Pusat, 33 Balai besar/Balai POM dan 2 (dua) Loka POM Kabupaten/Kota yaitu Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- f. Audit Esternal QMS ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh penyedia eksternal terhadap 64 (enam puluh empat) Unit Kerja di lingkungan BPOM.
- g. Rapat Tinjauan Manajemen BPOM.
- h. Pelaksanaan sosialisasi sistem penomoran naskah dinas secara elektronik di lingkungan Badan POM (Aplikasi SIPANDA).
- i. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi tanda tangan elektronik dalam rangka implementasi sistem informasi kearsipan dinamis di lingkungan Badan POM.
- j. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan dalam rangka tertib pengelolaan kearsipan sesuai kaidah untuk menjamin arsip aman, utuh dan terpercaya.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui :

- a. Penerapan Manual Organisasi yang terintegrasi akan dilaksanakan pada Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Kepala BPOM.
- b. Sertifikasi 19 (Sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan oleh unit kearsipan Biro Umum dan SDM dan meningkatkan implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di tingkat unit kerja pusat dan UPT.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melakukan sinkronisasi antara data *e-Performance* dengan data e-SKP, sehingga kinerja individu terlihat *cascadingnya* mendukung kinerja organisasi, selain hal tersebut pada tahun 2019 Biro Umum dan SDM akan menerapkan e-tukin dimana hal ini terkoneksi antara *finger print*, SKP triwulan serta peraturan-peraturan terkait *reward/punishment*, maka tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

- a. Biro Umum dan SDM bersama Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengintegrasikan indikator kinerja setiap individu kedalam aplikasi e-SKP untuk

mendukung pencapaian target masing- masing butir pekerjaan SKP masing- masing pegawai

- b. Biro Umum dan SDM telah menerbitkan kebijakan internal terkait pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-SKP, penilaian prestasi kerja dilakukan setiap triwulan, nilai penilaian prestasi kerja setiap triwulan dijadikan dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja triwulan berikutnya.
- c. Biro Umum dan SDM sedang mengembangkan aplikasi e-Tukin yang nantinya akan terkoneksi dengan e-SKP dan *fingerprint*.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui penyusunan kebijakan terkait Manajemen Kinerja dan Manajemen Karier serta Sistem Informasi ASN.

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melakukan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu (*Cascading*) untuk rumusan hasil dan ukuran kinerja, serta dilengkapi dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- a. Bimtek SAKIP dan Monev *Online*, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online (*e-performance*) dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
- b. Memantau pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.
- c. Rapat Kerja Nasional, untuk membahas perencanaan program/kegiatan tahun 2020.
- d. Review kesesuaian Renstra Unit Kerja dengan Renstra BPOM 2020 – 2024
- e. Review target indikator kinerja kegiatan s.d. komponen dengan pagu indikatif/anggaran/ alokasi tahun 2020.
- f. Monitoring dan evaluasi data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala.

- g. Mengembangkan Manajemen Kinerja BPOM, dengan melakukan mapping anggaran per indikator dari level 0 sampai dengan level 4.
- h. Rapat Evaluasi Nasional untuk membahas Evaluasi capaian program/kegiatan tahun 2019.
- i. Reviu Pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BPOM.
- j. Penyusunan evaluasi akhir periode Renstra BPOM Tahun 2015-2019.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator komponen penguatan akuntabilitas antara lain:

- a. Membakukan formula pengukuran seluruh Indeks yang ada agar dapat di uji relevansi antara angka Indeks yang dihasilkan dengan Sasaran Kinerja yang ingin diwujudkan;
- b. Indikator persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebaiknya tidak dicantumkan pada Level BPOM dan Deputi, melainkan cukup pada level Direktur atau Kepala Balai Besar/Balai;
- c. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Deputi Penindakan, dengan memindahkan Sasaran 2 s.d sasaran 6 ke masing-masing direktorat, sehingga yang menjadi kinerja Deputi hanya Sasaran 1 “Menurunnya Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan” karena sasaran ini sudah merupakan hasil komposit dari seluruh sasaran No. 2 s.d 6. , sedangkan sasaran 7 dipertahankan sebagai bentuk sumbangsih deputi penindakan dalam penataan penerapan akuntabilitas kinerja di unitnya.

#### 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melalui: (1). Peningkatan pemahaman pegawai akan tugas fungsi dan ukuran keberhasilan dalam uraian tugas (*job description*) / perjanjian kerja, (2). Pengembangan berbagai jenis pelatihan dalam meningkatkan nilai-nilai budaya pelayanan prima, dan mengimplementasikan sistem *reward* dan *punishment*, guna memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan, (3). Pengembangan survei eksternal pada setiap jenis pelayanan, menindaklanjuti hasil survei yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayanan, dan (4). Penambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kinerja, maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- a. Tanda Tangan Elektronik Sertifikat CDOB, SKE Pangan, Persetujuan Registrasi Obat.
- b. Sertifikat CDOB terintegrasi dengan OSS dan pengembangan aplikasi live chat.
- c. Implementasi sertifikat CPOB melalui aplikasi e-CPOB terintegrasi OSS.
- d. Pengembangan SIAPIK; aplikasi Persetujuan pelaksanaan Uji Klinik (PPUK); Sistem Notifikasi obat tradisional komposisi tertentu dan suplemen kesehatan komposisi sederhana; aplikasi Sistem Registrasi iklan OT dan SK (SIREKA); aplikasi respon cepat Obat dan Makanan versi mobile; subsite ULPK.
- e. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha pangan olahan melalui Webinar (Web Seminar).
- f. Pelaksanaan konsultasi online registrasi pangan olahan dengan pejabat struktural.
- g. KIE tentang registrasi pangan olahan melalui Digital Marketing.
- h. Implementasi penuh aplikasi New AERO.
- i. Penyusunan perubahan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat terkait mekanisme reliance dan penghapusan approvable letter dengan kondisi tertentu.
- j. Aplikasi Otomatisasi Proses Kerja (Bisnis Proses) Alur Sampel yang dapat diakses oleh pelanggan secara elektronik.
- k. Sistem Informasi Pelayanan Pengujian (SIPEPENG).
- l. Sistem Clustering Registrasi OT, SK dan Notifikasi Kosmetik.
- m. Pembuatan sistem aplikasi pengajuan permohonan protokol uji praklinik/klinik secara online (SIPUKO).
- n. Pemutakhiran Export Consultation Desk (ECD).
- o. Perluasan akses pengaduan masyarakat melalui operasionalisasi mobil HaloBPOM dan aplikasi BPOM *mobile*.
- p. Web Chat Konsultasi Pangan pada aplikasi SKI dan SKE Pangan.
- q. Membangun sistem antrian online untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pelayanan publik.
- r. Membangun Gedung pelayanan public (Gedung D) dengan konsep green building dan mutakhir.
- s. Melakukan renovasi terhadap sarana dan prasarana serta kenyamanan Gedung pelayanan publik (Gedung B), termasuk fasilitas difabel.
- t. Melakukan penataan keindahan diluar Gedung Badan POM.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui melakukan monev terhadap seluruh aplikasi pelayanan publik BPOM untuk melihat efisiensi dan efektifitas dari seluruh aplikasi yang sudah dibuat; melakukan monev terhadap hasil tindaklanjut pelatihan/bimtek pegawai pemberi layanan; membuat Modul Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar dan Lanjutan; Penataan lanskap gedung Badan POM (Plasa, rooftop garden dan garden wall); penyelesaian pembangunan gedung layanan public; reviu master plan Kawasan Badan POM; perkuatan struktur gedung kantor; pengembangan gedung record center; dan penambahan daya listrik 1550 Kva.

**Indikator kinerja yang kedua** adalah “Opini BPK atas laporan keuangan BPOM” adalah WTP dari target WTP, sehingga capaian indikator adalah 100%. Capaian indikator ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu WTP.

Cara perhitungan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM adalah penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2019, upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2018. Opini WTP ini merupakan yang kelima secara berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2018 atas Laporan Keuangan Tahun 2017.

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu BPOM akan secara terus menerus melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK atas Laporan Keuangan BPOM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, berkaitan dengan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yaitu PNBPF fungsional, Penerimaan

PNBP Lainnya, Potongan tukin dalam Belanja Pegawai, Kesalahan Penganggaran, Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Aset Tetap, Pelaksanaan Belanja Barang dan Pelaksanaan Belanja Modal. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berikut kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Opini BPK atas laporan keuangan BPOM tahun 2019 antara lain:

1. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (pusat dan BB/BPOM).
2. Reviu kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Pelatihan Laporan Keuangan.
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.

BPOM juga telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan *Quality Management System* (QMS), Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan BPOM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

Indikator Opini BPK atas laporan keuangan BPOM berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator antara lain :

1. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM sesuai dengan SAP.
2. Pelatihan/Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang di selenggarakan oleh Kementerian Keuangan atau pun Lembaga Pelatihan.
3. Bimbingan Teknis kepada Satuan Kerja di Pusat dan Daerah guna mendukung kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP.

<b>Sasaran 2</b>	<b>Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik</b>
<b>IKU</b> <b>Nilai Pengelolaan BMN BPOM</b>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	72	77,46	107,58	107,58	70	69,18	98,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Nilai Pengelolaan BMN BPOM**” adalah 77,46 dari target 72, sehingga capaian indikator adalah 107,58%. Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 69,18.

Nilai Pengelolaan BMN BPOM dihitung berdasarkan nilai aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan yaitu rata-rata Nilai Pemusnahan, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan Status Penggunaan BPOM, nilai kepatuhan pelaporan BPOM dan nilai Sertifikasi BMN BPOM.

Capaian indikator Nilai Pengelolaan BMN BPOM melebihi dari target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari target awal karena pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan kegiatan Inventarisasi BMN (Sensus BMN) untuk seluruh satker di lingkungan Badan POM; Biro Umum dan SDM selaku Pembina BMN Badan POM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi BMN tersebut sekaligus memberikan pendampingan dan pembinaan pengelolaan BMN di seluruh satker, Balai/Balai Besar POM.

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu Pemberian Sosialisasi ataupun penghargaan kepada Satker Pengelola BMN dengan nilai paling baik. Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai Pengelolaan BMN BPOM pada tahun 2019 antara lain:

- a. Sosialisasi pengelolaan BMN diberikan bersamaan dengan kegiatan Pemutakhiran BMN Semester I TA 2019 di Jakarta.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan BMN di 3 (tiga) lokasi antara lain Balai Besar POM (BBPOM) di Manado, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Padang yang diikuti oleh Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dan pengelola BMN satker.
- c. Konsolidasi Badan POM dan BPK terkait Pengelolaan BMN dan Barang Bukti Hasil Penindakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Banyuwangi, Jawa Timur.
- d. Pemberian apresiasi kepada satker yang mengelola BMN dengan baik oleh pimpinan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2019.

Indikator Nilai Pengelolaan BMN BPOM berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui penyusunan kebijakan terkait pengelolaan BMN di lingkungan Badan POM, update basis data hasil inventarisasi (sensus) BMN dan monitoring tindak lanjut terkait pengelolaan BMN, dan penyusunan kajian terkait manajemen asset.

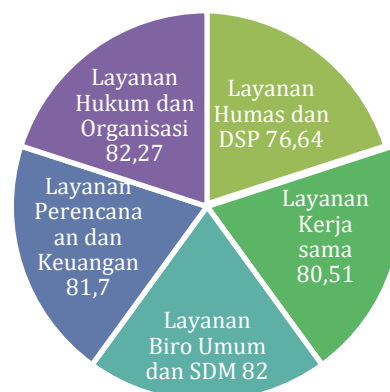
<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen</b>
<b>IKU</b> <i>Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	61	61	80,62	132,16	132,16	60	77,36	128,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen**” adalah 80,62 dari target 61, sehingga capaian indikator adalah 132,16%. Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 77,36.



Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan seluruh unit kerja di BPOM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit kerja BPOM terhadap layanan Biro Humas dan DSP, Biro Kerja Sama, Biro Umum dan SDM, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Hukum dan Organisasi.

Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen dihitung berdasarkan hasil Survei kepuasan SDM BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang dinilai dari nilai kepentingan dan kepuasan (masing-masing dihitung dalam skala *likert*).

Survei layanan dukungan manajemen di Sekretariat Utama antara lain :

1. Layanan Biro Humas dan DSP meliputi : (1). Publikasi kegiatan strategis BPOM di akun media sosial resmi BPOM, (2). Siaran pers/ penjelasan/ klarifikasi BPOM, (3). Berita aktual kegiatan di *website* BPOM, (4). Monitoring berita harian dan pemantauan isu terkait Obat dan Makanan, (5). Koordinasi dalam penanganan pengaduan Masyarakat, (6). Penyusunan informasi terkini/standar jawaban bagi petugas layanan ULPK dan *Contact Center* HaloBPOM, (7). Koordinasi dan/atau keterlibatan dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan (sebagai narasumber, pramujaga, penyediaan produk informasi), (8). Penyediaan data layanan informasi dan pengaduan Masyarakat serta Pengelolaan Produk Informasi dan Dokumentasi (PPID), (9). Koordinasi dan ketersediaan bahan substansi kegiatan Kepala BPOM, (10). Pelaksanaan desk dalam rangka monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan, (11). Penjadwalan kegiatan yang menghadirkan Kepala BPOM, (12). Penjadwalan kegiatan yang menghadirkan Pejabat Eselon I (Sestama/ Deputi 1/ Deputi 2/ Deputi 3/ Deputi 4), (13). Tata persuratan dari/ kepada Kepala BPOM, (14). Tata persuratan dari/ kepada Kepala BPOM Pejabat Eselon I (Sestama/ Deputi 1/ Deputi 2/ Deputi 3/ Deputi 4),

- (15). Pelayanan protokoler pada kegiatan pimpinan, (16). Penyelenggaraan apel bulanan/ upacara peringatan hari besar nasional.
2. Layanan Biro Kerja sama meliputi: (1). Penyusunan naskah kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri, (2). Penyiapan bahan kerja sama dengan pihak mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional dan multilateral, (3). Penyelesaian persetujuan dan *exit permit* perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.
  3. Layanan Biro Umum dan SDM meliputi :
    - a. Layanan Kepegawaian BPOM meliputi: (1). Proses Mutasi Pegawai, (2). Proses Kenaikan Pangkat/Jabatan (3). Proses Pensiun, (4). Proses Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, (5). Proses Pengangkatan dan Pemberhentian dari PNS, (6). Sistem Informasi Kepegawaian (SIAP, e-cuti, e-SKP, Sisfo dll), (7). Proses Pemberian Penghargaan (Satya Lencana, pegawai teladan), (8). Proses Disiplin PNS (9). Proses Konseling PNS.
    - b. Layanan umum meliputi: (1) layanan kerumahtanggaan, (2) layanan kearsipan dan (3) layanan pengelolaan BMN.
  10. Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi (1). Penyusunan revisi renstra, (2). Penyusunan perencanaan kinerja berbasis BSC (Peta Strategi), (3). Penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja, RKT, PK), (4). Penyusunan RKAKL, DIPA, POK, (5). Revisi DIPA/POK, (6). Penyusunan juklak anggaran dan juknis pelaksanaan kegiatan, (7). Penyusunan pedoman rkakl, (8). Penyusunan laporan kinerja (Bimtek SAKIP), (9). Monev kinerja dan anggaran baik secara manual maupun online (SMART, Bappenas, Tepra, *e-Performance*), (10). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, (11). Pengelolaan perbendaharaan, (12). Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, (13). Penyusunan laporan keuangan.
  11. Layanan Biro Hukum dan Organisasi meliputi: (1). Penyusunan peraturan perundang-undangan di BPOM, (2). Penyusunan rumusan perjanjian (MOU, Perjanjian Kerja Sama) di BPOM, (3). Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di BPOM, (4). Advokasi hukum di BPOM terkait pemberian pertimbangan dan konsultasi hokum, (5). Advokasi hukum di BPOM terkait penanganan perkara saksi/ahli, (6). Layanan Advokasi hukum di BPOM terkait pendampingan hukum saksi/ahli, (7). Advokasi hukum di BPOM terkait penyuluhan hukum, (8). Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi di BPOM, (9). Ketatalaksanaan (fasilitasi penyusunan peta proses bisnis, peta lintas fungsi, SOP Makro dan/atau Mikro, serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2015) di BPOM, (10). Pelaksanaan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi, (11). Pemanfaatan *subsite* jdih.pom.go.id, (12). Pemanfaatan *subsite* sistem Manajemen Mutu BPOM (qms.pom.go.id).

Capaian indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2019 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 132,16% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan dan belum dilakukan reuiu target pada tahun 2019. Selain itu, survei yang dilakukan dari kelima Biro di Sekretariat Utama belum menggunakan metode yang sama.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2019 antara lain:

1. Layanan Biro Humas dan DSP

- a. Penyusunan dan sosialisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) makro Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan kepada seluruh unit di BPOM yang terdiri dari SOP makro POM-01.03/CFM.01/SOP.01 tentang Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan, POM-08.01/CFM.01/SOP.01 tentang Keprotokolan, dan POM-08.02/CFM.01/SOP.01 tentang Layanan Hubungan Masyarakat.
- b. Penunjukan narahubung di unit kerja untuk berkomunikasi dan berkoordinasi tentang permasalahan tertentu misalnya Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi dan Tim Media Sosial.
- c. Pertemuan dan komunikasi secara berkala antara Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan dengan unit kerja untuk mengoordinasikan kegiatan pimpinan sehari-hari baik dari aspek kesekretariatan, keprotokolan, monitoring tindak lanjut arahan pimpinan, maupun bahan substansi. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan memiliki *WhatsApp Group* (WAG) dengan unit teknis untuk memudahkan komunikasi sehari-hari misalnya WAG antara setiap Kesekretariatan Eselon 1 di Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan dengan perwakilan unit kerja (biasanya Kepala Seksi Tata Operasional) yang disupervisi oleh Pejabat Eselon I dan WAG koordinasi protokoler.
- d. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana di Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan serta perwakilan unit kerja sehingga terbentuk

persamaan persepsi dan pemahaman. Kegiatan tersebut di antaranya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, Lokakarya Peningkatan Kapasitas Dukungan Strategis Pimpinan, dan Bimbingan Teknis Protokol.

2. Layanan Biro Kerja sama

- a. Penyusunan SOP Makro POM-13.01/CFM.01/SOP.01 tentang Penyusunan Perjanjian Kerja Sama, POM-13.01/CFM.01/SOP.02 tentang Pengembangan Jejaring Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, POM-13.01/CFM.01/SOP.03 tentang Penyiapan Kertas Posisi, dan POM-13.01/CFM.01/SOP.04 tentang Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- b. Pengembangan aplikasi sistem informasi *database* MoU/Perjanjian Kerja Sama BPOM berbasis website pada tautan kerja sama.pom.go.id. Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan unit kerja mendapatkan akses informasi kerja sama yang dimiliki oleh BPOM.
- c. Pemuktahiran data *Export Consultation Desk* (ECD) sebagai dukungan dalam pemberian informasi terkait peraturan ekspor produk Obat dan Makanan di negara tujuan. Saat ini, ECD telah mempunyai informasi mengenai regulasi Obat dan Makanan di 67 negara.
- d. Koordinasi dengan unit kerja pusat dan BB/B/Loka POM melalui online untuk monitoring dan evaluasi kerja sama.
- e. Peningkatan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyiapan bahan kunjungan kerja Kepala BPOM ke luar negeri.
- f. Peningkatan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, e-mail dan *whatsapp group*.

3. Layanan Kepegawaian BPOM

- a. Melakukan *Coaching Clinic* kepada Kasie TOP/Kasubbag TU/Pengelola Kepegawaian tentang peraturan dan layanan pengelolaan kinerja, karier dan kearsipan.
- b. Melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi Jabatan Fungsional tertentu (JF Analis Kebijakan, JF Analis Kepegawaian, dan JF Perencana) di Unit Kerja Pusat maupun UPT.
- c. Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja,

- d. Penyusunan Analisis Beban Kerja pada seluruh unit kerja pusat maupun UPT dan penyusunan informasi jabatan untuk Kepala UPT dengan SOTK baru, JF Penatalaksana Barang Terampil, JF Psikologi Klinis, JF Analisis Anggaran.
- e. Mapping Sumber Daya (SDM dan Sarpras) terhadap 10 Loka POM Kabupaten/Kota yaitu Loka POM Kab.Tangerang, Loka POM Kab. Bogor, Loka POM Kab. Tasikmalaya, Loka POM Kota Surakarta, Loka POM Kab. Banyumas, Loka POM Kab. Kediri, Loka POM Kab. Jember, Loka POM Kab. Tarakan, Loka POM Kab. Ende, dan Loka POM Kab. Palopo.
- f. Pelaksanaan Bimbingan dan Supervisi Kearsipan di BPOM Pusat, BB/ Balai/ Loka POM.
- g. Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) melalui komitmen penyelenggaraan tertib arsip oleh Kepala Badan POM dan jajarannya.
- h. Penyusunan template Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- i. Membangun sistem digitalisasi layanan kepegawaian yang terintegrasi dan updating database kepegawaian secara berkala.
- j. Adanya peningkatan pemanfaatan klinik konseling dan kesehatan BPOM sehingga terjadi peningkatan engagement pegawai.
- k. Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan, PPNS teladan, dan penguji teladan pada saat acara Rapat Evaluasi Nasional tahun 2019.
- l. Monitoring dan evaluasi inventarisasi (sensus) BMN berikut pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan BMN pada satker Balai Besar/Balai POM.
- m. Focus Group Discussion (FGD) dan pertemuan konsolidasi terkait Pengelolaan BMN di 5 daerah.
- n. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar seperti gedung layanan publik, fasilitas pendukung lain seperti penataan luar lingkungan kantor, renovasi gedung kantor, pembangunan gedung kantin, pembangunan gudang, pembangunan genset, pembangunan hydrant yang terintegrasi dan drainase, serta kendaraan operasional.
- o. Layanan pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin serta kendaraan operasional melalui aplikasi e-sarpras dan jaringan komunikasi (PABX dan Whatsapp).
- p. Pendampingan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh satker di lingkungan Badan POM.
- q. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa Badan POM.

4. Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
  - a. Melakukan perkuatan koordinasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, e-mail, *whatsapp group*.
  - b. Membuat Bank Data yang memuat data-data terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi.
  - c. Membuat Google Sites yang memuat materi dan usulan kegiatan terkait penganggaran.
  - d. Menerima konsultasi masalah yang dihadapi unit kerja Pusat dan BB/BPOM terkait masalah perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan. Konsultasi dapat melalui tatap muka, komunikasi melalui telepon, *whatsapp* maupun e-mail.
  
5. Layanan Biro Hukum dan Organisasi
  - a. Pelaksanaan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi,
  - b. Pemanfaatan *subsite* jdih.pom.go.id, dan
  - c. Pemanfaatan *subsite* sistem Manajemen Mutu BPOM (*qms.pom.go.id*).

Indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui :

1. Melakukan reuiu target indikator dan menaikkan target indikator pada Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.
2. Menyusun metode survei indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang sama untuk kelima Biro di Sekretariat Utama.
3. Peningkatan koordinasi dan penguatan komunikasi secara berkala dengan unit terkait.
4. Penunjukan narahubung di unit kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan.
5. Integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.
6. Sosialisasi dan *coaching clinic* peraturan dan kebijakann terkait pengelolaan BMN, sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang dan jasa.
7. Monev pengadaan barang dan jasa sebagai dasar penyelenggaraan *focus group discussion* secara periodic per triwulan.
8. Penyusunan pedoman pengelolaan BMN di lingkungan Badan POM.

9. Melakukan reviu kebijakan pola karier dan manajemen talenta sebagai dampak penyederhanaan birokrasi (penghapusan Eselon 3 dan 4).
10. Menyusun Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan POM dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai.
11. Reviu peta jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan POM.
12. Implementasi Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
13. Percepatan pengembangan aplikasi program dan jalur komunikasi dalam hal pelayanan dukungan manajemen seperti aplikasi monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan dan aplikasi persuratan pimpinan.
14. Peningkatan *awareness* dan komitmen SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan dalam implementasi RB, *Quality Management System* (QMS), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
15. Perbaikan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) di Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan memberikan pelayanan bagi pemangku kepentingan Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.
16. Peningkatan koordinasi dan penguatan komunikasi secara berkala dengan unit terkait.
17. Penunjukan narahubung di unit kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

<b>Sasaran 4</b>	<b>Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM</b>
<b>IKU</b> <i>Indeks Opini Publik BPOM</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran keempat ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 9. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	65	-	-	-	-	63	66,3	105,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Opini Publik BPOM	65	65	85,20	131,08	131,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Indeks Opini Publik BPOM**” adalah 85,20 dari target 65, sehingga capaian indikator adalah 131,08%.

Indeks opini positif Masyarakat terhadap BPOM dihitung berdasarkan hasil survei tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap BPOM dengan pendekatan statistik-kuantitatif.

Opini positif Masyarakat terhadap BPOM merupakan persepsi Masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia. Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM dihitung berdasarkan hasil survei tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap BPOM dengan pendekatan statistik kuantitatif dan kualitatif. Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi reputasi BPOM di Masyarakat yang meliputi *awareness, familiarity, favorability, trust*, dan advokasi.

Indikator kinerja “**Indeks Opini Publik BPOM**” dengan indeks target 65. Indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei kepada 500 orang responden di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar, baik kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dilakukan dengan metodologi survei wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan survei kualitatif dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah/*Forum Group Discussion* (FGD). Dari survei tersebut diperoleh indeks nilai 85,2 atau 131,08% dari

target. Nilai ini masuk ke dalam kategori “perlu dipertahankan” berarti BPOM telah sukses dalam meyakinkan masyarakat atas kinerja pengawasan yang telah dilakukan dan perlu dipertahankan. Indeks nilai ini naik 1,9 poin dari capaian tahun 2018 lalu yaitu sebesar 83,3.

Terdapat perbedaan nama indikator di tahun 2018 (Persentase Opini Positif Masyarakat terhadap BPOM) dan tahun 2019 (Indeks Opini Publik BPOM). Perbedaan keduanya lebih terkait pada istilah dan penyebutannya saja, namun sebenarnya tidak ada perbedaan dalam definisi, metodologi survei dan cara menghitungnya.

Capaian indikator Indeks opini positif publik BPOM tahun 2019 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 131,08% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan responden survei belum bersifat nasional, atau belum mewakili masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan dan terpencil.

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Indeks Opini Publik ini adalah telah dilakukannya berbagai upaya antara lain:

1. Publikasi tentang Obat dan Makanan secara umum maupun hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia melalui penerbitan 64 siaran pers, 11 penjelasan/klarifikasi berita, dan 231 berita aktual. Selain itu juga dilakukan publikasi berbagai kegiatan dan kinerja BPOM di berbagai media elektronik, antara lain *talkshow* di televisi dll.
2. Pengelolaan media sosial *official* BPOM baik *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, maupun *Youtube* dilakukan dengan lebih aktif/ komunikasi dua arah, dimana HaloBPOM menanggapi/menjawab seluruh pertanyaan/ keluhan *netizen/followers* BPOM dengan informatif. Informasi yang dipublikasikan pun tidak lagi hanya terkait kegiatan strategis BPOM, namun juga konten edukatif tentang Obat dan Makanan, dan segala informasi tentang Obat dan Makanan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti klarifikasi hoaks, dll.
3. Pembentukan komunitas anti hoaks Obat dan Makanan dengan menggandeng Masyarakat Indonesia Anti Fitnah Indonesia, para *influencer* yang bergerak di bidang kesehatan, serta para mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia.
4. Peningkatan kompetensi para petugas BPOM yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi dari BPOM pusat, Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, dan Kantor

BPOM di kabupaten/kota terkait pembuatan konten kreatif, penayangan/pemuatannya di berbagai media, serta kegiatan kehumasan lainnya, sehingga bisa memberikan informasi tentang BPOM maupun tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan informatif.

5. KIE Obat dan Makanan aman yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. KIE secara langsung dilakukan melalui penyebaran informasi, sosialisasi, layanan informasi dan pengaduan, penggalangan komitmen komunitas masyarakat, edukasi di area *Car Free Day* (CFD), pameran/klinik konsumen, dll. KIE secara tidak langsung dilakukan melalui berbagai media informasi seperti media sosial (*Instagram, Twitter, Fanpage, Youtube*), televisi, radio, surat kabar/majalah/tabloid, media *online*, maupun media promosi lainnya.

Selama tahun 2019, BPOM telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain:

1. Pengelolaan isu tentang Obat dan Makanan secara umum maupun BPOM secara khusus melalui monitoring pemberitaan, analisis, dan rekomendasi tindak lanjutnya secara rutin harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
2. Koordinasi lintas sektor kehumasan dengan kementerian/lembaga lain, lembaga sosial masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun organisasi kehumasan lainnya.
3. *Workshop* Informasi dan Komunikasi yang diikuti oleh petugas kehumasan dari seluruh Indonesia, baik BPOM pusat, Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, dan Kantor BPOM di kabupaten/kota.
4. Pengelolaan berbagai akun media sosial *official* BPOM secara lebih intensif dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan maupun penanganan pengaduan.

Indikator Indeks Opini Publik BPOM akan berlanjut di tahun 2020. Upaya peningkatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator tersebut di tahun 2020 antara lain melalui penyusunan *agenda setting* yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai program/kegiatan publikasi kinerja BPOM maupun edukasi tentang Obat dan Makanan baik secara tatap muka langsung maupun melalui berbagai media massa seperti media cetak, elektronik, *online*, dan media sosial. Selain itu juga akan lebih gencar dalam implementasi strategi *community engagement*, sehingga keterlibatan masyarakat dan komunitas lebih nyata.

<b>Sasaran 5</b>	<b>Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama</b>
<b>IKU</b> <i>Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dukungan manajemen</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kelima ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

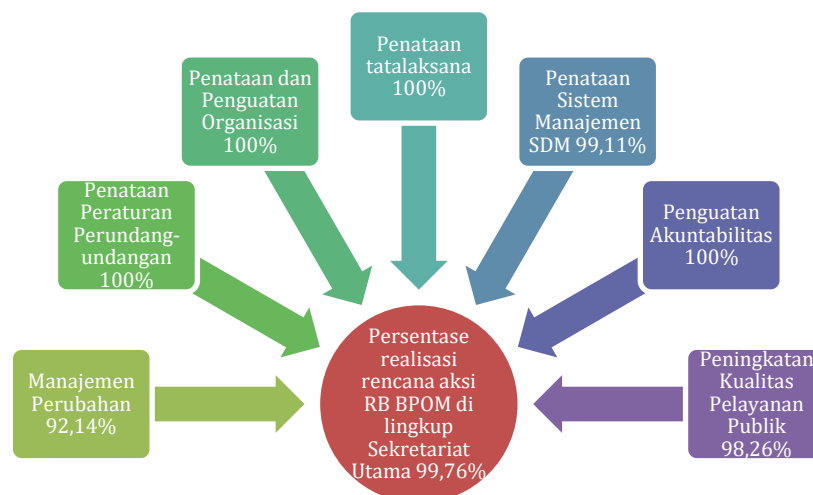
**Tabel 10. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dukungan manajemen	100	100	99,44	99,44	99,44	100	92,24	92,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama**” adalah 99,44% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 99,44%. Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan capaian 2018 (92,24%).

Rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama merupakan rencana aksi program Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdapat pada roadmap RB 2015-2019 berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019.

Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dihitung dengan membandingkan Jumlah rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama yang terlaksana dengan Jumlah rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama pada tahun berjalan.



Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 99,44%, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Manajemen Perubahan: penyusunan road map engagement pegawai BPOM sudah pada tahap finalisasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Utama, sedangkan Pembangunan aplikasi E-monev RB masih dalam tahap pengembangan.
2. Penataan Sistem Manajemen SDM: belum tercapainya pada kegiatan Kebijakan Penyederhanaan birokrasi yang mempengaruhi implementasi Pedoman Pola Karier dan Manajemen Talenta di Lingkungan Badan POM; Integrasi akses control dengan aplikasi e-tukin sedang dalam proses pengembangan; Aplikasi e-SKP sedang dalam proses pengembangan untuk menyesuaikan secara bertahap implementasi PP 30/2019 mengenai Penilaian Kinerja PNS.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik: belum tercapainya pada kegiatan Pengembangan Aplikasi Persetujuan Pelaksana Uji Klinik (PPUK) yang disebabkan masih adanya pengembangan dan menunggu tahap SIT dan UAT; Pengembangan Aplikasi Sistem Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (SIREKA) disebabkan masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem SIREKA dan kurangnya kemampuan pelaku usaha ketika mengoperasikan sistem aplikasi; Pembuatan sistem aplikasi pengajuan permohonan protocol uji praklinik/klinik secara online (SIPUKO) disebabkan masih terdapat kekurangan pada sistem SIPUKO oleh pengembang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Manajemen Perubahan

- FGD dan internalisasi nilai (*value*) Organisasi.
- Penetapan SK Agen Perubahan Badan POM Reformasi Birokrasi di seluruh Unit Kerja BPOM. Agen perubahan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.04.2.82.02.18.1101 Tahun 2018 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pelatihan Asesor PMPRB Tahun 2019.
- Rangkaian Kegiatan yang melibatkan Agen Perubahan Badan POM. Kegiatan tersebut terdiri dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan RB unit kerja, penyusunan Buku Agenda Perubahan RB BPOM Tahun 2019, Pertemuan Nasional Internalisasi Reformasi Birokrasi dalam rangka Fasilitasi Reformasi Birokrasi BPOM, *Capacity Building* dan FGD Agen Perubahan BPOM serta Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM.
- Penetapan dan Pelaksanaan *Quick Wins* Badan POM tahun 2019 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.03.19.842 tentang Penetapan Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019.
- Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

BPOM telah melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. BPOM memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/*Policy Paper*, dan Paraf Koordinasi.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Pemetaan Peralihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional BPOM serta pemetaan Jabatan Administrasi BPOM yang Tidak Dapat Dialihkan/Disederhanakan ke Jabatan Fungsional.
- Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

- Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
- Monitoring penilaian klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

4. Penataan tatalaksana

Penyusunan Draft Manual Organisasi Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017, Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM) serta Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kabupaten Ende, dan Loka POM di Kota Tanjungpinang serta pelaksanaan surveilan QMS ISO 9001:2015 atas Manajemen Puncak BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Kegiatan Workshop Coaching Clinic kepada Kasie TOP/Kasubbag TU/Pengelola Kepegawaian tentang peraturan dan layanan pengelolaan kinerja, karier dan kearsipan.
- Kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi Jabatan Fungsional tertentu (JF Analis Kebijakan, JF Analis Kepegawaian, dan JF Perencana) di Unit Kerja Pusat maupun UPT.
- Kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja,
- Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja pada seluruh unit kerja pusat maupun UPT dan penyusunan informasi jabatan untuk Kepala UPT dengan SOTK baru, JF Penatalaksana Barang Terampil, JF Psikologi Klinis, JF Analis Anggaran.
- Kegiatan Desk Mapping Sumber Daya (SDM dan Sarpras) terhadap 10 Loka POM Kabupaten/Kota yaitu Loka POM Kab.Tangerang, Loka POM Kab. Bogor, Loka POM Kab. Tasikmalaya, Loka POM Kota Surakarta, Loka POM Kab. Banyumas, Loka POM Kab. Kediri, Loka POM Kab. Jember, Loka POM Kab. Tarakan, Loka POM Kab. Ende, dan Loka POM Kab. Palopo.
- Kegiatan Workshop Penyusunan template Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- Digitalisasi layanan kepegawaian yang terintegrasi dan updating database kepegawaian secara berkala.

- Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan, PPNS teladan, dan penguji teladan pada saat acara Rapat Evaluasi Nasional tahun 2019.
  - Kegiatan Seminar Psikoedukasi untuk pegawai unit kerja pusat.
  - Telah dilakukan verifikasi implementasi Sistem Merit oleh KASN.
6. Penguatan Akuntabilitas :
- Rapat Kerja Nasional, untuk membahas perencanaan program/kegiatan tahun 2020.
  - Penyusunan Renstra BPOM Tahun 2020-2024.
  - Review kesesuaian Renstra Unit Kerja dengan Renstra BPOM 2020 – 2024.
  - Review target indikator kinerja kegiatan s.d. komponen dengan pagu indikatif/anggaran/ alokasi tahun 2020.
  - Sosialisasi dan Bimtek SAKIP dan Monev Online, Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran.
  - Monitoring dan evaluasi data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala.
  - Reviu Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan; Pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BPOM; serta reviu Kebijakan Akuntansi.
  - Implementasi dan pengembangan sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning, e-budgeting, e-Performance BPOM, dan sistem Penatausahaan dan Pelaporan PNBP).
  - Rapat Evaluasi Nasional untuk membahas Evaluasi capaian program/kegiatan tahun 2019.
  - Penyusunan evaluasi akhir periode Renstra BPOM Tahun 2015-2019.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Melaksanakan kebijakan survei kepuasan Masyarakat secara berkala, Evaluasi kebijakan survei kepuasan Masyarakat secara berkala, Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survei kepuasan Masyarakat secara berkala, Hasil survei terintegrasi dalam *subsiste* RB BPOM, Penyempurnaan media pengaduan pelayanan, Monev Integrasi media pengaduan pelayanan publik *online*.

Indikator Rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, akan tetapi tahun 2020 tetap disusun roadmap rencana aksi RB per kelompok kerja dan dimonitoring serta dievaluasi capaian rencana aksi setiap triwulan untuk mendukung tercapainya nilai RB BPOM.

<b>Sasaran 6</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>
<b>IKU</b> <i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran keenam ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 11. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	-	100	-	-	100	-

*Indikator kinerja yang pertama* adalah “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%. Capaian indikator ini sama dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 100.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu merupakan dokumen yang meliputi: 1) Renstra BPOM/ Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis, 2) Renja BPOM tahun n+1, 3) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n, 4) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1, 5) Laptah BPOM n-1, 6) Perjanjian kinerja Sektama Tahun n, 7) Lapkin sektama tahun n -1, 8) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1, 9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1, 10) Laporan keuangan BPOM semester 1 tahun n, 11) Laporan Keuangan Sektama tahun n-1 dan 12) Laporan keuangan Sektama semester 1 tahun n yang diselesaikan tepat waktu

berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh *deadline* yang diberikan oleh suprasistem terkait.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan Jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah dokumen yang dihasilkan.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, sama jika dibandingkan pada tahun 2018 dengan capaian 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Reviu Grand Design Pengawasan Obat Dan Makanan.
2. Reviu Indikator Kinerja Utama BPOM.
3. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra BPOM 2020-2024.
4. Penyusunan Rancangan Renstra BPOM 2020-2024.
5. Pertemuan Penyusunan Perencanaan Tahunan.
6. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama, serta Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018.
7. Penyusunan Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama, Badan Pom Tahun 2018.
8. FGD Laporan Keuangan Badan POM.
9. Sosialisasi Dan Bimtek Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran.
10. Penyiapan Bahan Dan Pengawalan RDP Dengan Mitra Kerja Badan POM.
11. Koordinasi Penganggaran Dengan Lintas Sektor.
12. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Dengan Stakeholder.
13. Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat Dan UPT BPOM.
14. Pertemuan Rekonsiliasi Hibah/Penganggaran Dengan Stakeholder.
15. Monitoring Kegiatan PNB Di Balai POM Dalam Rangka Penyusunan Program PNPB 2019.
16. Bimtek Kemandirian Loka POM.
17. Sosialisasi Program DAK Badan POM Ke Kabupaten/Kota.
18. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola data dalam melakukan entry data pada aplikasi monev online serta melakukan laporan kinerja melalui Sosialisasi Bimtek SAKIP dan Monev Online.

19. Melakukan pendampingan/ asistensi ke unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan, dokumen monitoring dan evaluasi serta dokumen laporan kinerja.
20. Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2019 Di Surabaya.

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan *e-planning*, Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPP) dan *e-performance*.
2. Finalisasi Rencana Strategis 2020-2024.
3. Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan dan pelaporan PNPB dengan aplikasi *web form*, *e-payment* dan layanan publik (*yanblik*).

<b>Sasaran 7</b>	<b>Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen</b>
<b>IKU</b> <b>1. Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik</b> <b>2. Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik</b>	

Keberhasilan pencapaian sasaran ketujuh ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2019**

No	Indikator	2019		2019			2018			2017			2016			2015			
		T	R	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89	89	86,05	96,68	96,68	87	81,4	93,56	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85	85	97,93	115,21	115,21	84	86	102,38	82	98,40	120	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik**” adalah 86,05% dari target 89%, sehingga capaian indikator adalah 96,68%. Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 81,4%.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Satker dinilai mampu mengelola BMN dengan baik apabila dapat melaksanakan seluruh aspek pengelolaan BMN meliputi: Pemusnahan Barang, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan Status Penggunaan termasuk kepatuhan pelaporan BPOM dan Sertifikasi aset sesuai ketentuan dengan nilai minimal 60 (enam puluh).

Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik dihitung dengan membandingkan Jumlah satker yang mengelola BMN dengan baik dengan jumlah satker di BPOM.

Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 86,05 dari target 89 atau mencapai 96,68%. Realisasi ini berdasarkan nilai pengelolaan BMN dengan *range* nilai baik yaitu 60-100, dimana terdapat 37 satker yang bernilai baik dari 43 satker yang ada. Hal ini dipengaruhi karena satker kurang tertib dalam pelaksanaan pengelolaan BMN terutama penghapusan BMN, pemusnahan BMN, dan penetapan status penggunaan BMN. Terdapat 2 (dua) satker yang terlambat mengirimkan laporan BMN semester I TA. 2019.

Selama tahun 2019, Sekretariat Utama telah melaksanakan pembinaan berbagai proses pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN di seluruh Satker di BPOM. Sekretaris Utama yang menerima pendelegasian kewenangan selaku Pengguna Barang dari Kepala Badan POM berwenang untuk menyetujui persetujuan terhadap penghapusan, pemusnahan, penetapan status penggunaan dan pemindahtanganan BMN sesuai kewenangannya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah Komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan pengelola BMN untuk mengelola BMN dengan baik.

Indikator ini tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan Peningkatan kemampuan SDM khususnya Pengelola BMN serta dilakukan intensifikasi pembinaan terhadap pengelola BMN pada satker BPOM dan melaksanakan tindak lanjut terhadap inventarisasi (sensus) BMN untuk seluruh Satker di lingkungan Badan POM.

**Indikator kinerja yang kedua** adalah “**Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik**” adalah 97,93% dari target 85%, sehingga capaian indikator adalah 115,21%. Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 86%.

SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik merupakan penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistemprestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik dihitung berdasarkan penilaian prestasi kerja individu minimal 76 yang dihitung dari capaian sasaran kinerja pegawai (60%) dan penilaian perilaku (40%).

Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 97,93%, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 dengan capaian 115,21%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Melakukan pendampingan penyusunan dan monitoring evaluasi penilaian kinerja pegawai setiap triwulan melalui aplikasi e-SKP.
2. Pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja per triwulan .
3. Melaksanakan pendampingan dan *coaching clinic* layanan kepegawaian.

4. Melakukan sosialisasi hasil survei opini pegawai dan penyusunan intervensi hasil survei opini berupa roadmap program *engagement* pegawai.

Indikator ini tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut melalui penyusunan butir kegiatan SKP pegawai hingga level individu berdasarkan petunjuk teknis setiap jabatan fungsional di lingkungan Badan POM, implementasi standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional PFM, reviu kebijakan terkait manajemen kinerja dan manajemen karier, serta penyusunan roadmap perencanaan karier pegawai berdasarkan Pedoman Pola Karier dan Manajemen Talenta.

<b>Sasaran 8</b>	<b>Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran</b>
<b>IKU</b> <i>Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kedelapan ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana merupakan rekomendasi hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana yang diberikan kepada BPOM oleh Kementerian PANRB, BPK, KPK, dan/atau lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015. **Indikator kinerja** “rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total

**rekomendasi”** dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi.

Target rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana yang diukur berdasarkan indikator ini dapat direalisasikan 100% sesuai target sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase capaian target adalah 100%. Pengukuran kinerja menggunakan indikator ini mulai ditetapkan tahun 2018.

Realisasi capaian 100% dipengaruhi oleh tindak lanjut yang dilakukan BPOM atas rekomendasi dari Kementerian PANRB dan TUV SUD selaku evaluator auditor eksternal yang merupakan output dari kegiatan penataan dan penguatan organisasi dan penataan tata laksana sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>A. Dari Kementerian PANRB</b>	
<p>1. Menindaklanjuti dan mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) kepada seluruh unit kerja yang tidak hanya sebatas pada tim/pokja instansi saja, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah agar menginternalisasikan RB secara menyeluruh dan nyata kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan BPOM.</p>	<p>a. Pertemuan Nasional Internalisasi RB BPOM tanggal 15 s.d. 16 Mei 2019 yang melibatkan Tim RB BPOM terdiri atas Kepala BPOM, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPOM, serta para Kepala UPT Balai Besar/Balai/Loka POM untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pegawai di seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM terkait RB dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>b. Penandatanganan Piagam Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPOM oleh Kepala BPOM dan seluruh Pimpinan BPOM serta perwakilan dari Kementerian PANRB dan Ombudsman RI sebagai Saksi.</p>
<p>2. Tindak lanjut atas persetujuan tertulis Menteri PANRB mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Pengujian Obat</p>	<p>a. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.</p>

Rekomendasi	Tindak Lanjut
dan Makanan Nasional melalui Surat Nomor B/735/M.KT.01/2019 tanggal 22 Agustus 2019 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.	b. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
3. Tindaklanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.	Penyampaian Surat Sekretaris Utama BPOM kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor OT.02.01.02.08.19.0929A tanggal 19 Agustus 2019 tentang Hasil Evaluasi Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
<b>B. Dari TUV SUD</b>	
Tindaklanjut rekomendasi hasil audit sertifikasi QMS ISO 9001:2015 untuk peningkatan pelaksanaan sistem mutu di lingkungan BPOM.	Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM Nomor B-OT.02.02.2.22.05.19.1174 tanggal 15 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil RTM dan Audit Eksternal 2018.

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran”.

Indikator ini berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain:

1. Penataan kelembagaan Unit Kerja BPOM Pusat dan UPT dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sesuai arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.
2. Pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

3. Penerapan Manual Organisasi integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017 dalam rangka efektivitas dokumentasi mutu di lingkungan BPOM.
4. Pelaksanaan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM di Kabupaten/Kota.

<b>Sasaran 9</b>	<b>Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum</b>
<b>IKU</b>	
<b>1. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun</b>	
<b>2. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan</b>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kesembilan ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun**” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%. Capaian indikator ini sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 100% .

Rancangan peraturan perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur), Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun dapat dihitung dengan membandingkan perundangan-undangan yang selesai disusun terhadap rancangan perundang-undangan yang diterima.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Selama tahun 2019, BPOM telah melakukan penyusunan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah, 36 (tiga puluh enam) Peraturan BPOM, 98 (sembilan puluh delapan) Keputusan Kepala BPOM, dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Rumusan Perjanjian Kerja Sama.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis dengan mengundang tim ahli (bila perlu)
2. Melakukan pertemuan konsultasi dalam setiap proses penyusunan peraturan
3. Pengunggahan ke subsite [jdih.pom.go.id/](http://jdih.pom.go.id/) pengiriman rancangan peraturan ke stakeholder
4. Melaksanakan evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan
5. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain
6. Melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
7. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal.

Indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, dan berubah menjadi Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dengan definisi operasional yang berbeda. Akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut antara lain meningkatkan koordinasi kegiatan tersebut baik internal maupun eksternal.

**Indikator kinerja yang kedua** adalah “**Persentase advokasi hukum yang diselesaikan**” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Capaian indikator ini sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 100% .

Permintaan Advokasi Hukum terkait dengan Pemberian Pertimbangan Hukum, Penanganan Perkara/Kasus Hukum, Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Persentase advokasi hukum yang diselesaikan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah layanan advokasi yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan advokasi yang diterima.

Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Selama tahun 2019, BPOM telah melakukan 147 (seratus empat puluh tujuh) Layanan Pertimbangan Hukum, 51 (lima puluh satu) Layanan fasilitasi dan pendampingan hukum pemberian keterangan ahli, dan 44 (empat puluh empat) Layanan Perkara Hukum, dan 85 (delapan puluh lima) layanan konsultasi dan penyuluhan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melakukan pertimbangan hukum terkait permasalahan pengawasan di bidang obat dan makanan, penanganan perkara/biaya penyelesaian perkara, pemberian advokasi hukum dan penyuluhan hukum serta koordinasi pelaksanaan penanganan perkara/gugatan hukum BPOM.

Indikator Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024 dan berubah menjadi Tingkat keberhasilan advokasi hukum dalam penyelesaian perkara dengan definisi operasional yang berbeda. Akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut antara lain melakukan mediasi terhadap *stakeholder*.

<b>Sasaran 10</b>	<b>Meningkatnya kerja sama BPOM</b>
<b>IKU</b> <i>Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kesepuluh ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71	71	78,90	111,13	111,13	70	70	100	-	67	-	-	66	-	-	63	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “**Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM**” adalah 78,90 dari target 71 sehingga capaian indikator adalah 111,13%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 70.

Kerja sama yang dimaksud meliputi penajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta pelaksanaan kerja sama BPOM dengan mitra baik dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui kemitraan dengan lintas sektor terkait antara lain kerja sama dengan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi Masyarakat, asosiasi pelaku usaha, gerakan pramukan, dll. Kerja sama luar negeri dilaksanakan meliputi kerja sama dengan mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional, dan multilateral.

Dukungan manajemen Sekretariat Utama dalam “**Meningkatnya Kerja Sama BPOM**” melalui fasilitasi dan koordinasi kerja sama BPOM yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, berupa pelaksanaan kegiatan *capacity building* (workshop, seminar, desiminasi, *sharing experience/knowledge*, dll), kegiatan bersama (*joint inspection, joint assessment*, dll), penyusunan naskah dan dokumen kerja sama, rapat koordinasi, dll.

Jumlah kerja sama diukur berdasarkan capaian penyusunan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra di dalam negeri dan luar negeri, posisi BPOM/Indonesia dalam forum kerja sama internasional, penyiapan bahan kerja sama, dll. Sedangkan efektivitas kerja sama diukur berdasarkan jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan minimal 1 ruang lingkup.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM.

Capaian indikator Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM tahun 2019 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 111,31% dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatnya koordinasi internal dan eksternal. dalam penyiapan bahan Kerja sama serta monitoring dan evaluasi kerja sama.
2. Sistem manajemen mutu BPOM yang telah diimplementasikan dengan baik.
3. Tersedianya panduan penyiapan bahan kerja sama dan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri.
4. Meningkatnya komitmen unit kerja dan mitra kerja sama dalam implementasi kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing negara dan dengan lintas sektor terkait di dalam negeri.

Selama tahun 2019, BPOM telah memiliki 86 kerja sama yang telah diimplementasikan dari total kerja sama sebanyak 109 kerja sama (Lampiran 10) yang terdiri dari:

1. 17 kerja sama bilateral yang telah dilaksanakan dari 19 negara mitra. Kerja sama yang belum efektif antara lain kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat Thiongkok (RRT) dan Korea Selatan yang saat ini masih membahas rancangan MoU antara Badan POM dengan SATCM, RRT dan MFDS, Korea Selatan;
2. 19 kerja sama sama regional dan multilateral yang telah dilaksanakan dari 20 forum Kerja sama regional dan multilateral. Kerja sama yang belum efektif antara lain kerja sama pada forum ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) - *Responding to All Hazards and Emerging Threats*. Pada forum ini, BPOM berperan dalam *strategic objectives 4*, yaitu *Optimize Use of Antimicrobial Medicines*, pada 4.2. *Regulate post-marketing quality of drugs under the coordination by NRA/DRA to ensure access to safe and quality antibiotics*. Pada tahun 2019, belum terdapat pembahasan mengenai isu tersebut.
3. 50 kerja sama dalam negeri telah dilaksanakan dari 70 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri. Kerja sama yang belum dilaksanakan antara lain

kerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, KPID Provinsi Banten, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pematangsiantar, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Kabupaten Nias, Universitas Sahid, Universitas Terbuka Batam, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Universitas Wira Wacana, Universitas Islam Riau, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah kabupaten Karanganyar, PT Grab Teknologi Indonesia, Politeknik Kesehatan Bengkulu, Kementerian Hukum dan HAM, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, dan Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan beberapa unit kerja belum menyampaikan data implementasi kerja sama. Terkait hal ini, Sektama c.q. Biro Kerja Sama akan meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam hal monitoring dan evaluasi kerja sama.

Indikator Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024 dan berubah menjadi indikator persentase kerjasama yang efektif, akan tetapi upaya peningkatan terhadap kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif tetap dilakukan melalui :

1. Pengembangan aplikasi *database* internal untuk memonitor progres layanan Biro Kerja Sama.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.
3. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.
4. Sosialisasi pedoman dan *roadmap* kerja sama kepada unit kerja dan lintas sektor terkait.
5. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

<b>Sasaran 11</b>	<b>Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen</b>
<b>IKU</b> <b>1. Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM</b> <b>2. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1</b> <b>3. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung</b>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kesebelas ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87	87	99,58	114,46	114,46	85	99,3	116,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	61	61	78,1	128,03	128,03	60	77,05	128,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93	93	95,65	102,85	102,85	92	96,2	104,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM” adalah 99,58% dari target 87%, sehingga capaian indikator adalah 114,46 %. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 99,3.

Pemberitaan positif adalah pemberitaan mengenai BPOM di berbagai media baik media cetak, media elektronik, maupun media online dengan kategori berita *tone* netral (jika isi berita hanya menyebutkan nama BPOM) dan *tone* positif (jika ada pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan kepada BPOM dari pihak lain).

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pemberitaan dengan *tone* netral dan positif dibandingkan keseluruhan pemberitaan tentang BPOM.

Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM di tahun 2019 mencapai target yang ditentukan. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. BPOM semakin cepat tanggap terhadap beredarnya isu tentang Obat dan Makanan yang meresahkan masyarakat antara lain melalui klarifikasi, penjelasan berita maupun siaran pers yang dipublikasikan melalui berbagai media, baik tanpa maupun dengan konferensi pers.
2. BPOM semakin sering melibatkan media dalam kegiatan-kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga media pun semakin gencar memberitakan.
3. BPOM memberikan informasi secara komprehensif disertai data-data pengawasan Obat dan Makanan yang *up to date* kepada media, sehingga pemberitaan positif dan berimbang.

Selama tahun 2019 BPOM telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini yaitu:

1. Wawancara/ *talkshow* narasumber BPOM tentang Obat dan Makanan dilakukan sesuai permintaan media dengan memperhatikan *deadline* pemuatan/ penayangannya.
2. Konferensi pers tentang isu aktual Obat dan Makanan terutama yang meresahkan masyarakat.
3. *Media Gathering* dengan mengangkat tema khusus utamanya terkait informasi tentang Obat dan Makanan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Peliputan kegiatan BPOM di seluruh Indonesia dengan melibatkan media, dalam upaya penyebaran informasi secara luas ke masyarakat.
5. Publikasi BPOM kepada masyarakat, baik secara langsung dengan melibatkan media maupun melalui berbagai media massa (cetak, elektronik, *online*, media sosial).
6. Distribusi konten publikasi Obat dan Makanan secara umum maupun BPOM secara khusus ke berbagai media dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Indikator kinerja Rasio Pemberitaan Positif di Media Terhadap Total Pemberitaan Tentang BPOM akan berlanjut di tahun 2020 dengan perubahan nomenklatur **Indeks Kualitas Pemberitaan BPOM di Media**. Indikator ini masih menggunakan cara

perhitungan yang sama. Upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh Badan POM antara lain:

- a. Penyebaran informasi mengenai kinerja pengawasan BPOM secara rutin kepada media, selain melalui pelaksanaan pertemuan dengan media, juga melalui penyampaian materi-materi kegiatan BPOM yang dilaksanakan tanpa mengundang media.
- b. Semakin banyaknya kegiatan BPOM yang melibatkan peran aktif media untuk meliput kegiatan maupun jumpa pers dengan Pimpinan BPOM.

Pemberian dokumentasi hasil peliputan kepada media tidak hanya berupa foto, video, dan rekam suara, namun juga materi paparan, siaran pers, sambutan, pointers, maupun data-data yang *up to date*.

**Indikator kinerja yang kedua** adalah **“Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1”** dengan indeks target 61. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan survei kepada perwakilan unit kerja di BPOM yang melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh Kepala BPOM. Dari survei tersebut diperoleh indeks dengan nilai 78,1 atau 128,03% dari target. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 77,05.

Koordinasi dalam rangka layanan dukungan manajemen eselon I adalah interaksi dan komunikasi Biro Humas dan DSP dengan unit kerja di BPOM dalam rangka mengoordinasikan layanan manajemen kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja dan dihadiri oleh Kepala BPOM. Layanan dukungan manajemen tersebut meliputi layanan terkait kesekretariatan dan penjadwalan, keprotokolan, materi substansi untuk Kepala BPOM, dan kehumasan (peliputan dan pemberitaan).

Indeks keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I dinyatakan dalam skala 0-100. Indeks dihitung dengan mengalikan rata-rata penilaian unit kerja (skala nilai 1 hingga 4), terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Biro Humas dan DSP dengan unit kerja, dengan faktor 25.

Capaian indikator Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1 tahun 2019 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 78,1 (128,03%) dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I adalah spesialisasi dan penajaman tugas dan fungsi dalam lingkup layanan dukungan manajemen

Eselon 1 yaitu kesekretariatan, keprotokolan, pengaturan agenda dan penyusunan bahan substansi. Spesialisasi ini meningkatkan koordinasi antara Biro Humas dan DSP dengan unit kerja pelaksana kegiatan untuk persiapan kegiatan pimpinan, khususnya dalam hal teknis keprotokolan dan pengaturan acara pimpinan dengan penyediaan bahan substansi pada kegiatan Kepala BPOM, dapat dilakukan dengan lebih baik dan fokus.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 dalam pencapaian target indikator tersebut antara lain melakukan komunikasi intensif maupun aktif mengikuti rapat koordinasi kegiatan dengan unit kerja pelaksana kegiatan yang akan dihadiri Kepala BPOM untuk membahas teknis persiapan kegiatan dari aspek kesekretariatan dan penjadwalan, keprotokolan, penyusunan bahan substansi untuk Kepala BPOM, dan peliputan serta pemberitaan kegiatan. Komunikasi dilakukan dalam rapat pembahasan maupun melalui *WhatsApp group*.

Indikator ini tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan upaya peningkatan terhadap koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1 melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan unit teknis penyelenggara kegiatan yang mengundang Kepala Badan POM serta penyelenggaraan pertemuan evaluasi rutin untuk menjangkau umpan balik dan masukan dari unit teknis dalam meningkatkan koordinasi layanan tersebut.

**Indikator kinerja yang ketiga adalah “Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung”** dengan capaian 95,65% dari target 93, sehingga capaian indikator adalah 102,85%. Capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 96,2%.

Layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung merupakan layanan pengaduan dan informasi Masyarakat yang dapat langsung dijawab atau diselesaikan oleh petugas layanan berdasarkan referensi yang telah tersedia tanpa perlu melakukan proses rujukan. Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber informasi yang lengkap, jelas dan terkini bagi petugas layanan saat memberikan layanan.

Indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah laporan layanan pengaduan dan informasi Masyarakat yang dijawab langsung terhadap data jumlah seluruh layanan.

Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2018 untuk mengukur kinerja layanan informasi dan pengaduan Masyarakat.

Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 102,85%, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Ketersediaan sumber data dan informasi sebagai acuan bagi petugas dalam memberikan layanan yaitu Aplikasi *Knowledge Base Contact Center (KBCC)*.
2. Percepatan *sharing* informasi terkait isu terkini tentang pelayanan publik di Badan POM dan isu Obat dan Makanan bagi petugas layanan.
3. Peningkatan kompetensi petugas layanan.

Selama tahun 2019, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pembaruan informasi pada Aplikasi *Knowledge Base Contact Center (KBCC)* secara berkala sebagai sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi petugas layanan.
2. Penyelenggaraan *Knowledge Sharing Forum* tentang isu pelayanan publik di Badan POM dan isu Obat dan Makanan, sehingga petugas layanan dapat memiliki pengetahuan terkini sebagai acuan pada saat melakukan layanan.
3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas layanan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang bersifat substantif dan kompetisi untuk memotivasi peningkatan kinerja.

Oleh karena itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya BPOM ikut serta dalam ajang *The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2019*, dimana *agent Contact Center HaloBPOM 1500533* telah berhasil meraih *Bronze Medal The Best Agent Lembaga Publik*.

Indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024 dan berubah menjadi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti, akan tetapi perlu upaya peningkatan terkait layanan pengaduan dan informasi tetap dilakukan di tahun 2020 melalui:

1. Melakukan *review* terhadap penetapan *Service Level Agreement (SLA)* tindak lanjut penyelesaian pengaduan di BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

2. Membangun *engagement* Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelesaian layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan setiap triwulan ke pimpinan termasuk rapor unit kerja sebagai penindak lanjut rujukan.
4. Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung *monitoring* dan evaluasi penyelesaian layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan.

<b>Sasaran 12</b>	<b>Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019</b>
<b>IKU</b> <i>Nilai AKIP Sekretariat Utama</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran duabelas ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

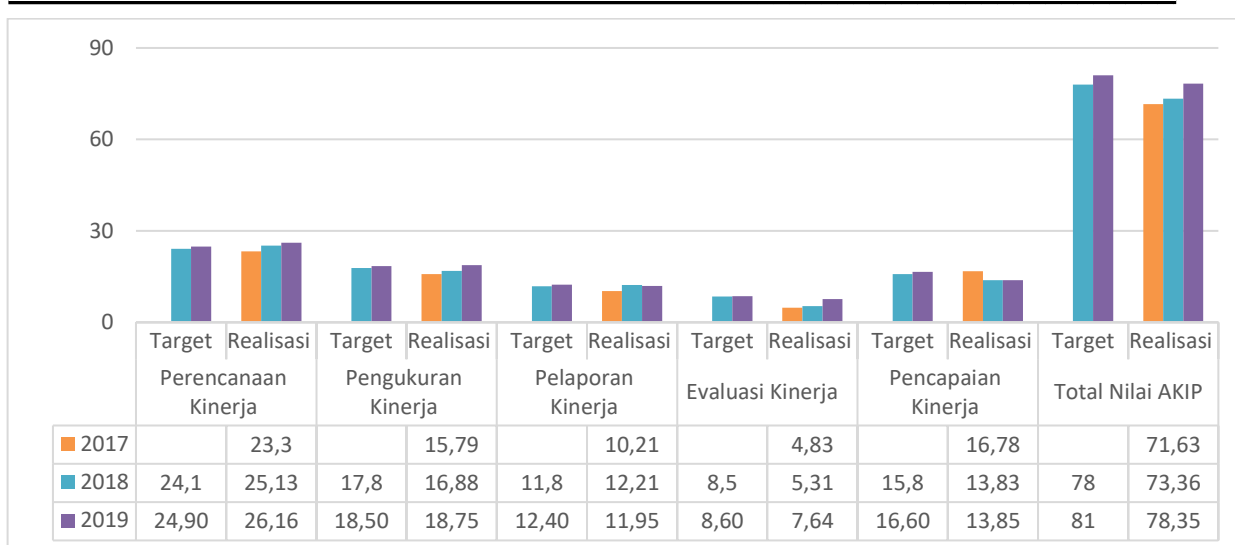
**Tabel 17. Pencapaian Sasaran Duabelas Tahun 2019**

No	Indikator	2019	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	81	78,35	96,73	96,73	78	73,36	94,05	-	71,63	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “Nilai AKIP Sekretariat Utama” adalah 78,35 dari target 81, sehingga capaian indikator adalah 96,73%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 73,36%.

Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Utama dengan 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%) dan Pencapaian Kinerja (20%).

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019



Nilai AKIP Sekretariat Utama tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 78,35 (96,73%), akan tetapi meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 dengan capaian 73,36. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Sekretariat Utama telah menerapkan sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal akuntabilitas kinerja. Penerapan sistem AKIP tersebut tercermin dalam berbagai dokumen yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Sekretariat Utama.
2. Telah terdapat reviu Renstra berupa perubahan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja, disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis dan perubahan struktur Badan POM.
3. Pada dokumen Rencana Strategis, tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan belum disertai dengan target keberhasilannya.
4. Sekretariat Utama belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang up to date.
5. Laporan kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, evaluasi kinerja, termasuk perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target jangka menengah.
6. Pelaksanaan sistem evaluasi internal belum sepenuhnya mampu memberikan evaluasi yang berkualitas. Hasil evaluasi juga belum disajikan di dalam laporan AKIP sebagai umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

7. Belum dilakukan publikasi terhadap revisi Renstra dan laporan kinerja Sekretariat Utama tahun 2018 pada website Badan POM.

Selama tahun 2019, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Penyusunan perencanaan tahunan (RKT dan PK).
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Sekretariat Utama per triwulan.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama tahun 2018.
4. Penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024
5. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM
6. Pada tahun 2019 telah dilakukan revisi Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan POM R.I Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 tanggal 28 April Tahun 2015. Hal ini dilakukan agar Badan POM memiliki pedoman internal dalam implementasi AKIP di masing-masing unit kerja. Pedoman tersebut mengatur tentang aspek-aspek dalam SAKIP yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.
7. Reviu penyusunan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Pada tahun 2016 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.04.2.21.08.16.3115 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Badan POM. Namun seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan kebijakan suprasistem, pada tahun 2019 dilakukan pembaruan terhadap pedoman tersebut. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
8. Pengembangan sistem penganggaran berbasis elektronik (Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran/e-SIPP).
9. Implementasi dan pengembangan sistem perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*)
10. Implementasi dan Pengembangan aplikasi manajemen kinerja (*e-performance*) dengan penambahan fitur pohon kinerja.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

Pada tahun 2019 dilakukan pengembangan aplikasi e-performance sehingga dapat ditampilkan pohon kinerja. Pada menu Pohon Kinerja dapat terlihat cascading suatu indikator sampai level paling bawah.



Gambar 9. Tampilan Pohon Kinerja Sekretariat Utama

Indikator ini berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain:

1. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
3. Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.
4. Memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
5. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.

**II. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN SEBELUMNYA**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 oleh Inspektorat I, Inspektorat Utama, BPOM, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Utama, antara lain:

1. Telah disusun penyelarasan Indikator Kinerja Utama pada Renstra sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja baru dengan merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Utama.
2. Penyajian informasi pengukuran kinerja dapat dipantau melalui aplikasi e-performance, akan tetapi mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja masih bersifat manual dan belum mampu ditelusuri berbasis teknologi informasi.
3. Informasi capaian kinerja pada laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.
4. Pengukuran kinerja dimonitoring secara periodik (triwulan) beserta hambatan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan.
5. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk perbaikan capaian tujuan dan sasaran di Lingkungan Sekretariat Utama.

### III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2019 Pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial. Selain itu dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, diinstruksikan setiap Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2019, pagu anggaran Sekretariat Utama adalah Rp386.738.331.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp379.075.701.650,- (**98,02%**), dengan rincian:

**Tabel 18. Realisasi Keuangan Sekretariat Utama Tahun 2019 Per Program**

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	313.704.279.000	306.249.574.725	97,62%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	73.034.052.000	72.826.126.925	99,72%

Realisasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 19. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program  
Sekretariat Utama Tahun 2019**

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>	<b>313.704.279.000</b>	<b>306.249.574.725</b>	<b>97,62%</b>
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	16.153.028.000	15.725.536.755	97,35%
2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	1.384.303.000	1.358.632.179	98,15%
3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	230.742.468.000	225.544.985.644	97,75%
4. Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	11.108.529.000	10.660.667.150	95,97%
5. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	4.402.061.000	4.303.509.996	97,76%
6. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	11.924.929.000	11.704.532.835	98,15%
7. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10.027.133.000	9.853.380.697	98,27%
8. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	2.440.253.000	2.397.474.142	98,25%
9. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	6.532.246.000	6.469.725.070	99,04%
10. Meningkatnya kerja sama BPOM	6.636.140.000	6.626.693.782	99,86%
11. Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	7.522.198.000	6.887.105.375	91,56%
12. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	4.830.991.000	4.717.331.100	97,65%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>	<b>73.034.052.000</b>	<b>72.826.126.925</b>	<b>99,72%</b>
1. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	73.034.052.000	72.826.126.925	99,72%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “**Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen**” yaitu sebesar 59,66%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung dan layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran **Menguatnya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Manajemen** (91,56%), dimana kegiatan yang realisasinya paling rendah adalah Penerbitan Media Publikasi BPOM. Capaian fisik kegiatan Penerbitan Media Publikasi BPOM, dari target sebesar 30 publikasi BPOM hanya terealisasi 25 atau sebesar 83,33%. Untuk capaian anggaran, dari target sebesar Rp.2.016.920.000,- hanya terealisasi Rp.1.434.710.500,- atau sebesar 71,13%. Kecilnya realisasi tersebut disebabkan karena beberapa kegiatan diundur pelaksanaannya di tahun 2020, yaitu pembuatan *video company profile* dan *advertorial* di berbagai media cetak. Pembuatan *video company profile* dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- diundur pelaksanaannya di tahun 2020 karena Badan POM akan melakukan perubahan struktur organisasi, sedangkan 4 *advertorial* di berbagai media cetak dengan anggaran sebesar Rp.382.209.500,- diundur pelaksanaannya di tahun 2020 karena Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan belum disahkan di tahun 2019 dan akan menjadi carry over di tahun 2020.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal antara lain:

- a. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya;
- b. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- d. Menyusun perencanaan tidak hanya *bussiness as usual*, namun perlu *breakthrough* sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.

#### IV. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

##### A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**  
**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 20. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program  
Sekretariat Utama Tahun 2019**

No	SASARAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	TE	KATEGORI
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97,35	98,29	1,01	1,00	0,01	Efisien
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	98,15	107,58	1,10	1,00	0,10	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	98,22	132,17	1,35	1,00	0,35	Efisien
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	95,97	131,08	1,37	1,00	0,37	Efisien
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	97,76	99,78	1,02	1,00	0,02	Efisien
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	98,15	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	98,27	105,73	1,08	1,00	0,08	Efisien
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	98,25	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	99,04	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	99,86	111,13	1,11	1,00	0,11	Efisien
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	91,56	113,41	1,24	1,00	0,24	Efisien
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97,65	90,90	0,93	1,00	-0,07	tidak efisien
	<b>Jumlah</b>	<b>98,02</b>	<b>106,23</b>	<b>1,08</b>	<b>1,00</b>	<b>0,08</b>	<b>Efisien</b>

Berdasarkan perhitungan efisiensi, dari 12 sasaran program di Sekretariat Utama, terdapat 1 sasaran yang **tidak efisien** yaitu Sasaran ke 12 “Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019” karena target nilai AKIP Sekretariat Utama dan Biro-Biro ditetapkan berdasarkan target BPOM, bukan berdasarkan baseline capaian tahun sebelumnya.

Capaian output (realisasi kinerja) 106,23% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 98,02% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,08 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,08.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

## **B. EFEKTIVITAS**

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

EMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN, KULTUR, REKREASI, DAN OLAH RAGA  
REPUBLIC OF INDONESIA



ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

## RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENAWARAN ARSIPAN





## BAB IV

# PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama tahun 2019 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dari 12 (dua belas) sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019, 1 sasaran program masuk kategori sangat baik, 9 sasaran program masuk kategori baik, dan 2 sasaran program masuk kategori tidak dapat disimpulkan.
2. Dari 9 (sembilan) sasaran program masuk kategori baik, terdapat 3 (tiga) sasaran program yang capaiannya belum mencapai 100% yaitu Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama, dan Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Untuk indikator Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan karena karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2019 belum keluar dari Kementerian PANRB.
  - b. Untuk indikator Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama:
    - Manajemen Perubahan: penyusunan *road map engagement* pegawai BPOM sudah pada tahap finalisasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Utama, sedangkan Pembangunan aplikasi E-monev RB masih dalam tahap pengembangan.
    - Penataan Sistem Manajemen SDM: belum tercapainya pada kegiatan Kebijakan Penyederhanaan birokrasi yang mempengaruhi implementasi Pedoman Pola Karier dan Manajemen Talenta di Lingkungan Badan POM; Integrasi akses control dengan aplikasi e-tukin sedang dalam proses pengembangan; Aplikasi

- e-SKP sedang dalam proses pengembangan untuk menyesuaikan secara bertahap implementasi PP 30/ 2019 mengenai Penilaian Kinerja PNS.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik: belum tercapainya pada kegiatan Pengembangan Aplikasi Persetujuan Pelaksana Uji Klinik (PPUK) yang disebabkan masih adanya pengembangan dan menunggu tahap SIT dan UAT; Pengembangan Aplikasi Sistem Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (SIREKA) disebabkan masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem SIREKA dan kurangnya kemampuan pelaku usaha ketika mengoperasikan sistem aplikasi; Pembuatan sistem aplikasi pengajuan permohonan protocol uji praklinik/klinik secara online (SIPUKO) disebabkan masih terdapat kekurangan pada sistem SIPUKO oleh pengembang.
- c. Untuk indikator Nilai AKIP Sekretariat Utama:
- Pada dokumen Rencana Strategis, tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan belum disertai dengan target keberhasilannya.
  - Sekretariat Utama belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*.
  - Pelaksanaan sistem evaluasi internal belum sepenuhnya mampu memberikan evaluasi yang berkualitas. Hasil evaluasi juga belum disajikan di dalam laporan AKIP sebagai umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
  - Belum dilakukan publikasi terhadap revisi Renstra dan laporan kinerja Sekretariat Utama tahun 2018 pada website Badan POM.
3. 2 (dua) sasaran program masuk kategori tidak dapat disimpulkan yaitu:
- a. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen, dikarenakan pada tahun 2018 indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan dan belum dilakukan reuiu target pada tahun 2019.
  - b. Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM disebabkan responden survei belum bersifat nasional, atau belum mewakili masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan dan terpencil.
4. Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 2 (dua) sasaran yang tidak efisien yaitu:
- a. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019” karena hasil nilai RB tahun 2019 belum keluar dari KemenPAN RB, sehingga capaian output berdasarkan capaian tahun 2018

- b. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019” karena target nilai AKIP Sekretariat Utama ditetapkan berdasarkan target BPOM, bukan berdasarkan baseline capaian tahun sebelumnya.

## II. SARAN

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran program Sekretariat Utama telah tercapai. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak tercapai 100% akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Melakukan reviu target indikator untuk indikator yang tidak dapat disimpulkan pada Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.
2. Menyusun metode survei indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang sama untuk kelima Biro di Sekretariat Utama.
3. Membuat mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang up to date, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, sistematis dan mampu ditelusur.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAMPIRAN 1

## RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen pengungkit diluar program penguatan pengawasan	51,9	54,3
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP
Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	70	72
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60	61
Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif masyarakat terhadap BPOM	63	-
	Indeks Opini Publik BPOM	-	65
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100%	100%
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	87%	89%
	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	84%	85%
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%	100%
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%	100%
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	100%
Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	70%	71%
Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	85%	87%
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	60	61
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	92%	93%
Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	78	81

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR HK.04.02.2.21.09.18.4677**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**TAHUN 2019**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019;
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Lampiran Keputusan Sekretaris Utama  
 Nomor HK.04.02.2.21.09.18.4677  
 Tentang Rencana Kinerja Sekretariat  
 Utama Badan Pengawas Obat dan  
 Makanan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	54,3
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	61
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Indeks Opini Publik BPOM	65
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100%
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89%
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85%
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	71%
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	61
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93%
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP  
Jabatan : Sekretaris Utama  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

( Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP )

Jakarta, 3 Januari 2019

Pihak Pertama

( Dra. Elin Herlina, Apt, MP )



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	54,3
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	61
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Indeks Opini Publik BPOM	65
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100%
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89%
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85%
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	71%
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	61
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93%
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Rp 291.143.360.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Rp 68.468.001.000,-

Pihak Kedua

( Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP )

Jakarta, 3 Januari 2019

Pihak Pertama

( Dra. Elin Herlina, Apt, MP )

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	-	-	-	54,3				
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	-	-	WTP				
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	-	-	72				
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	-	61				
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Indeks Opini Publik BPOM	-	-	-	65				
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	25%	50%	75%	100%				
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	50%	58%	75%	100%				
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	-	-	-	89%				
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85%	85%	85%	85%				
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	-	-	-	100%				
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	-	-	-	100%				
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	-	-	-	100%				
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	-	-	-	71%				
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87%	87%	87%	87%				
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	-	-	61				
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93%	93%	93%	93%				



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	-	81				

\*) diukur pada akhir tahun

Pihak Kedua

( Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP )

Jakarta, 3 Januari 2019

Pihak Pertama

( Dra. Elin Herlina, Apt, MP )

**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	
<b>Customer Perspective</b>										
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	1	Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan	-	51,9	54,3	51,28	53,36	98,81	98,27
		2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	70	72	69,18	77,46	98,83	107,58
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	60	61	77,36	80,62	128,93	132,16
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	5	Indeks Opini Publik BPOM	%	63	65	66,3	85,20	105,24	131,08
<b>Internal Process Perspective</b>										
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	6	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	%	100	100	92,24	99,44	92,24	99,44
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100,00
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	8	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	87	89	81,4	86,05	93,56	96,68
		9	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	%	84	85	86	97,93	102,38	115,21
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	10	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	%	100	100	100	100	100,00	100,00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	11	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100	100	100,00	100,00
		12	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	100,00
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	13	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	%	70	71	70	78,90	100,00	111,13
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	%	85	87	99,3	99,58	116,82	114,46
		15	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	60	61	77,05	78,1	128,42	128,03
		16	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	%	92	93	96,2	95,65	104,57	102,85
<b>Learning and Growth Perspective</b>										
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	17	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	78	81	73,36	78,35	94,05	96,73

**CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPS	KRITERIA	
<b>Customer Perspective</b>							<b>117,42</b>	<b>Sangat Baik</b>	
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	1	Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan	-	54,3	53,36	98,27	98,85	Baik
		2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00		
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	72	77,46	107,58	107,58	Baik
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	61	80,62	132,16	132,16	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	5	Indeks Opini Publik BPOM	%	65	85,20	131,08	131,08	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>104,96</b>	<b>Baik</b>	
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	6	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	%	100	99,44	99,44	99,44	Baik
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	Baik
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	8	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	89	86,05	96,68	109,04	Baik

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPS	KRITERIA
		9	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	%	85	97,93	115,21		
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	10	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	%	100	100	100,00	100,00	Baik
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	11	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100,00	100,00	Baik
		12	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	%	100	100	100,00		
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	13	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	%	71	78,90	111,13	111,13	Baik
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	%	87	99,58	114,46	115,11	Sangat Baik
		15	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	61	78,1	128,03		
		16	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	%	93	95,65	102,85		
<b>Learning and Growth Perspective</b>								<b>93,73</b>	<b>Baik</b>
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	17	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	81	78,35	96,73	96,73	Baik

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET		
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		1.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	12.886.568.000	12.589.995.155	97,70
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas		5,00	4,85	97,20
				Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00
		1.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	531.212.000	525.211.200	98,87
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	3	3,2	106,67
				Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	-	4,3	4,32	100,47
				Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	-	4,3	4,12	95,81
		1.3	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	2.110.763.000	1.992.283.250	94,39
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	4,77	4,54	95,18
		1.4	Pengelolaan SDM BPOM	<b>Input:</b>				
Dana	Rp			624.485.000	618.047.150	98,97		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	-	13,45	13,1	97,40
				Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	-	3,92	3,87	98,72
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>						
		2.1	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	1.384.303.000	1.358.632.179	98,15
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	72	77,46	107,58
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		3.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	646.851.000	640.107.713	98,96
				<b>Ouput:</b>				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen di Biro Kerja Sama	-	61	80,51	131,98
		3.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	1.275.975.000	1.260.572.718	98,79
				<b>Ouput:</b>				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen di Biro Perencanaan dan Keuangan	-	61	81,7	133,93
		3.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	394.599.000	392.112.500	99,37

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
			Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	<b>Ouput:</b>					
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	-	61	82,27	134,87	
		3.1	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	6.989.867.000	6.905.770.429	98,80	
				<b>Ouput:</b>					
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	-	61	76,64	125,64	
		3.1	Pengelolaan SDM BPOM	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	294.469.228.000	289.172.549.209	98,20	
				<b>Ouput:</b>					
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Umum dan SDM	-	61	82	134,43			
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>							
		4.2	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	11.108.529.000	10.660.667.150	95,97	
				<b>Ouput:</b>					
		Indeks Opini Publik BPOM	%	65	85,2	131,08			
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>							
		5.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	426.150.000	416.698.500	97,78	
		<b>Ouput:</b>							

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET		
			Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di Biro Perencanaan dan Keuangan	%	100	100	100,00		
		5.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	<b>Input:</b>						
				Dana	Rp	599.596.000	598.736.200	99,86		
				<b>Ouput:</b>						
					Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	%	100	100	100,00	
		5.1	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	<b>Input:</b>						
				Dana	Rp	482.478.000	430.374.899	89,20		
				<b>Ouput:</b>						
					Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	%	100	100	100,00	
		5.1	Pengelolaan SDM BPOM	<b>Input:</b>						
				Dana	Rp	2.893.837.000	2.857.700.397	98,75		
				<b>Ouput:</b>						
					Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di Biro Umum dan SDM	%	100	99,11	99,11	
		6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring,	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
6.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan			<b>Input:</b>						
				Dana	Rp	11.924.929.000	11.704.532.835	98,15		
		<b>Ouput:</b>								

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu		Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>						
		7.1	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	2.578.899.000	2.453.587.121	95,14
				<b>Ouput:</b>				
				Persentase Satker yang mengelola BMN dengan Baik		89	86,05	96,68
		<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		7.3	Pengelolaan SDM BPOM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	7.448.234.000	7.399.793.576	99,35
				<b>Ouput:</b>				
				Persentase SDM Badan POM yang memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	%	85	97,93	115,21
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		8.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	2.440.253.000	2.397.474.142	98,25
				<b>Ouput:</b>				
Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	%			100	100	100,00		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		9.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	6.532.246.000	6.469.725.070	99,04
				<b>Output:</b>				
				Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100,00
Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	%	100	100	100,00				
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		10.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	6.636.140.000	6.626.693.782	99,86
				<b>Output:</b>				
				Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	%	71	78,90	111,13
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		11.3	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	7.522.198.000	6.887.105.375	91,56
				<b>Output:</b>				
				Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	%	87	99,58	114,46
				Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	61	78,10	128,03
Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	%	93	95,65	102,85				

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
		12.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	242.909.000	242.378.774	99,78
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai AKIP Biro Kerjasama	Paket	81	72,38	89,36
		12.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	1.765.678.000	1.739.832.872	98,54
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	Paket	81	77,35	95,49
		12.3	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	1.931.243.000	1.855.714.656	96,09
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	Paket	81	73,44	90,67
		12.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	786.165.000	777.534.282	98,90
				<b>Ouput:</b>				
				Nilai AKIP Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	Paket	81	74,63	92,14
		12.5	Pengelolaan SDM BPOM	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	104.996.000	101.870.516	97,02
				<b>Ouput:</b>				
		Nilai AKIP Biro Umum dan SDM	Paket	81	70,36	86,86		

## LAMPIRAN 7

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	SASARAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	TE	KATEGORI
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97,35	98,29	1,01	1,00	0,01	Efisien
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	98,15	107,58	1,10	1,00	0,10	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	98,22	132,17	1,35	1,00	0,35	Efisien
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	95,97	131,08	1,37	1,00	0,37	Efisien
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	97,76	99,78	1,02	1,00	0,02	Efisien
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	98,15	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	98,27	105,73	1,08	1,00	0,08	Efisien
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	98,25	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	99,04	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	99,86	111,13	1,11	1,00	0,11	Efisien
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	91,56	113,41	1,24	1,00	0,24	Efisien
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97,65	90,90	0,93	1,00	-0,07	tidak efisien
	<b>Jumlah</b>	<b>98,02</b>	<b>106,23</b>	<b>1,08</b>	<b>1,00</b>	<b>0,08</b>	<b>Efisien</b>

## PENGUKURAN CAPAIAN RAPK SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI												
			B3	B6	B9	B12	B3			B6			B9			B12			
							a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	
1	3	4	10	11	12	13	14	15	16=(14/15)%	17	18	19=(17/18)%	20	21	22=(20/21)%	23	24	25=(23/24)%	
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen pengungkit diluar program penguatan pengawasan	-	-	-	54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,36
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	WTP	-	-	WTP	-	-	WTP
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,46
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,62
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Indeks Opini Publik Badan POM	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,20

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI											
			B3	B6	B9	B12	B3			B6			B9			B12		
							a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi
1	3	4	10	11	12	13	14	15	16=(14/15)%	17	18	19=(17/18)%	20	21	22=(20/21)%	23	24	25=(23/24)%
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	25%	50%	75%	100%			Progres 23%			Progres 45%			Progres 78,44%	505	508	99,44%
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	50%	58%	75%	100%	4	12	33,33%	7	12	58,33%	9	12	75,00%	12	12	100%
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	-	-	-	89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	43	86,05%
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85%	85%	85%	85%	4473	4619	96,84%	4473	4619	96,84%	4473	4619	96,84%	4544	4640	97,93%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI											
			B3	B6	B9	B12	B3			B6			B9			B12		
							a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi
1	3	4	10	11	12	13	14	15	16=(14/15)%	17	18	19=(17/18)%	20	21	22=(20/21)%	23	24	25=(23/24)%
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	-	50%	50%	100%	0	0	0	1	2	50%	1	2	50%	2	2	100%
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	25%	50%	75%	100%	94	220	42,73%	176	220	80,00%	247	247	100%	263	263	100%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	82	82	100%	152	152	100%	245	245	100%	327	327	100%
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	16%	35%	50%	71%	7	91	7,69%	28	91	30,77%	51	91	56,04%	86	109	78,90%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI											
			B3	B6	B9	B12	B3			B6			B9			B12		
							a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi
1	3	4	10	11	12	13	14	15	16=(14/15)%	17	18	19=(17/18)%	20	21	22=(20/21)%	23	24	25=(23/24)%
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87%	87%	87%	87%	1827	1838	99,40%	4667	4681	99,70%	7583	7600	99,78%	12965	13020	99,58%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	-	-	61			73,96			76,3			76,56			78,10
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93%	93%	93%	93%	4267	4513	94,55%	7738	8124	95,25%	12802	13425	95,36%	18171	18998	95,65%
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,35

Keterangan:

a : pembilang

b : penyebut

## LAMPIRAN 9

## MAPPING ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
A	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>				<b>313.704.279.000</b>	<b>306.249.574.725</b>	<b>97,62%</b>
1	SS1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	IK1-Nilai RB BPOM komponen pengungkit diluar program penguatan pengawasan	3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan		<b>16.153.028.000</b>	<b>15.725.536.755</b>	<b>97,35%</b>
				Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis	1.045.750.000	1.042.607.960	99,70%
				Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi	201.570.000	192.545.600	95,52%
				Rapat Kerja Nasional Pengawasan Obat Dan Makanan	529.762.000	526.993.600	99,48%
				Workshop Anggaran Dan Perbendaharaan	662.830.000	657.044.165	99,13%
				Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pom Tahun 2018	121.010.000	120.983.800	99,98%
				Sosialisasi Dan Bimtek Sakip Dan Monev Online	977.225.000	977.166.500	99,99%
				Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/Balai Pom	537.891.000	537.782.957	99,98%
				Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Reformasi Birokrasi	1.199.765.000	1.194.017.750	99,52%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
			4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Fasilitasi Reformasi Birokrasi BPOM	531.212.000	525.211.200	98,87%
			4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Pertemuan Dengan Media Massa	1.601.033.000	1.486.933.250	92,87%
				Pembahasan Program Dan Evaluasi Kegiatan Layanan Pengaduan Dan Informasi Konsumen/Masyarakat	509.730.000	505.350.000	99,14%
			4112 Pengelolaan SDM BPOM	Pembahasan Reformasi Birokrasi	53.285.000	48.891.750	91,76%
				Implementasi Road Map Strategi Pengelolaan SDM Dan BMN	571.200.000	569.155.400	99,64%
		IK2-Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Penyusunan Juklak Dan Juknis	246.950.000	244.492.500	99,00%
				Koordinasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran	521.657.000	511.277.200	98,01%
				Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait	297.395.000	158.527.025	53,31%
				Koordinasi, Evaluasi Dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan Pom	562.718.000	557.346.281	99,05%
				Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	292.600.000	273.408.688	93,44%
				Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat Dan Balai)	359.380.000	346.235.306	96,34%
				Penyusunan Laporan Keuangan BPOM	2.551.851.000	2.519.512.670	98,73%
				Fgd Penatausahaan Dan Pelaporan PNBPFungsional BPOM	645.962.000	639.059.788	98,93%
				Review Kebijakan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	218.270.000	215.874.200	98,90%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Koordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan	28.260.000	26.180.000	92,64%
				Honor Pengelola PNB	176.976.000	176.060.000	99,48%
				Revisi Pedoman Pengelolaan PNB	372.445.000	371.707.797	99,80%
				Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	208.880.000	204.785.138	98,04%
				Monitoring Kegiatan Satker Sekretariat Utama	95.480.000	93.994.404	98,44%
				Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PNB Fungsional	766.400.000	762.141.100	99,44%
				Workshop Laporan Keuangan	63.337.000	63.054.600	99,55%
				FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	202.204.000	177.196.126	87,63%
2	SS2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	IK3-Nilai Pengelolaan BMN BPOM			<b>1.384.303.000</b>	<b>1.358.632.179</b>	<b>98,15%</b>
			4112 Pengelolaan SDM BPOM	Konsultasi Nasional Pemutakhiran BMN Dalam Rangka Pengelolaan Kinerja	852.493.000	843.416.402	98,94%
				Pengelolaan Kinerja BMN Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	295.500.000	281.947.277	95,41%
				Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN	236.310.000	233.268.500	98,71%
3	SS3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	IK4-Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen			<b>230.742.468.000</b>	<b>225.544.985.644</b>	<b>97,75%</b>
			3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	401.626.713	98,48%
				Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	238.481.000	99,78%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
			3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Pemantapan Mekanisme Penganggaran Di Bb/BPOM	949.092.000	934.986.418	98,51%
				Keperluan Sehari-Hari Rorenkeu	36.000.000	35.999.300	100,00%
				Koordinasi Biro Perencanaan Dan Keuangan Lintas Sektor	290.883.000	289.587.000	99,55%
			4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Perkuatan Biro Hukum Dan Organisasi Terkait Peraturan, Advokasi Serta Organisasi Dan Tatalaksana	394.599.000	392.112.500	99,37%
		4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan		Rapat Koordinasi Pimpinan/Khusus/Staf	441.072.000	440.596.002	99,89%
				Koordinasi Lintas Sektor Pimpinan Dalam Dan Luar Negeri	4.786.652.000	4.731.251.870	98,84%
				Analisis Kebijakan Strategis	295.646.000	295.527.772	99,96%
				Monitoring Dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan	640.954.000	639.525.610	99,78%
				Monitoring, Dan Evaluasi Kinerja Biro Humas Dan DSP	595.860.000	591.140.275	99,21%
				Upacara Dan Pelantikan	209.683.000	196.473.000	93,70%
				Pemeliharaan Alat Pengolah Data	20.000.000	11.255.900	56,28%
		4112 Pengelolaan SDM BPOM		Bimbingan Teknis Dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pegawai	293.856.000	289.636.240	98,56%
				Pendampingan Dalam Rangka Pembinaan SDM	105.000.000	104.745.275	99,76%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Monitoring Dan Evaluasi Kehadiran Pegawai Dalam Rangka Penegakkan Disiplin	81.560.000	81.315.300	99,70%
				Coaching Clinic Kepegawaian Dan Kearsipan	307.610.000	304.216.900	98,90%
				Koordinasi Pengelolaan Belanja Pegawai Dan Tunjangan Kinerja Badan Pom	122.370.000	116.586.500	95,27%
				Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	429.860.000	429.571.700	99,93%
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai	279.000.000	278.879.600	99,96%
				Keikutsertaan Dalam Kegiatan Badan Pom/Instansi Eksternal	791.616.000	787.733.582	99,51%
				Tata Kelola Kepegawaian	174.890.000	174.165.850	99,59%
				Pengadaan Alat Pengolah Data Bagian Penganggaran	172.000.000	170.500.000	99,13%
				Pengadaan Alat Pengolah Data Bagian Keuangan	197.200.000	191.218.000	96,97%
				Pengadaan Alat Pengolah Data Bagian Monev Dan Pelaporan	153.000.000	152.550.000	99,71%
				Alat Pengolah Data Dan Multimedia Biro Kerja Sama	319.800.000	306.511.700	95,84%
				Pengadaan Alat Pengolah Data Biro Hukum Dan Organisasi	136.680.000	134.491.200	98,40%
				Pengadaan Alat Pengolah Data Biro Hdsp	141.700.000	140.600.000	99,22%
				Pengadaan Pengolah Data Biro Umum SDM	25.000.000	22.800.000	91,20%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Pengadaan Fasilitas Perkantoran Biro Ks	155.200.000	119.669.412	77,11%
				Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Kantor Biro HDSP	158.300.000	157.398.700	99,43%
				Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Kantor Bagian Monev Dan Pelaporan	47.000.000	40.750.000	86,70%
				Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	68.904.616.000	66.189.320.198	96,06%
				Tunjangan Kinerja	84.291.949.000	83.918.312.953	99,56%
				Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4/6	3.677.770.000	3.677.563.365	99,99%
				Koordinasi Lintas Sektor	147.300.000	107.310.000	72,85%
				Supervisi Pengelolaan BMN, Sarana Prasarana, Pengadaan Barang Jasa Dan Pengelolaan Belanja Pegawai	1.655.450.000	1.522.866.134	91,99%
				Analisis Struktur Gedung F	100.000.000	83.875.000	83,88%
				Perawatan Kendaraan Operasional Roda 2	91.000.000	90.887.251	99,88%
				Langganan Daya Dan Jasa	5.308.920.000	4.882.407.494	91,97%
				Perawatan Gedung Dan Bangunan	11.138.402.000	10.950.205.372	98,31%
				Cleaning Service	3.518.150.000	3.454.566.649	98,19%
				Jasa Keamanan Dan Pengamanan	4.020.530.000	3.930.752.111	97,77%
				Pemeliharaan Alat Pengolah Data/Mesin Elektronik/Teknologi Informasi	495.175.000	493.820.291	99,73%
				Sewa Bangunan Kantor/Pergudangan	2.812.780.000	2.796.399.400	99,42%
				Pemeliharaan Hygiene Dan Sanitasi Ruang	200.000.000	179.756.225	89,88%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Honor Pramubakti Dan Pengelola Kegiatan BPOM	23.317.835.000	22.921.698.423	98,30%
				Pengelolaan Honor Pramubakti Dan Pengelola Kegiatan Sektama	4.897.742.000	4.441.349.167	90,68%
				Penyelenggaraan Operasional Pekantoran	285.200.000	285.136.185	99,98%
				Pengadaan Pakaian Sopir/Teknisi/Satpam/Paskibraka	281.140.000	279.366.360	99,37%
				Sewa Digital Informasi/Videotron	190.230.000	189.640.000	99,69%
				Pemeliharaan Jaringan	172.875.000	162.552.800	94,03%
				Sewa Perlengkapan Acara BPOM	686.165.000	675.150.872	98,39%
				Sewa Rumah/Apartemen Dinas Kepala Badan	939.030.000	938.764.000	99,97%
				Biaya Langganan Deputi IV	91.800.000	74.483.205	81,14%
				Penyusunan Pedoman K3 Perkantoran Dan Standar Sarana Prasaran BPOM	119.475.000	96.898.870	81,10%
4	SS4. Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	IK5-Indeks Opini Publik BPOM	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan		<b>11.108.529.000</b>	<b>10.660.667.150</b>	<b>95,97%</b>
				Pengelolaan Isu	1.748.250.000	1.525.251.108	87,24%
				Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Unit Kegiatan Layanan Pengaduan dan KIE	212.210.000	200.245.109	94,36%
				Workshop Informasi dan Komunikasi	1.198.506.000	1.160.775.140	96,85%
				Media Engagement (tunggakan TA 2018)	132.000.000	132.000.000	100,00%
				Pengelolaan Media Sosial	933.770.000	913.525.684	97,83%
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	1.637.575.000	1.604.535.935	97,98%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				KIE Obat dan Makanan di Sarana Ritel	701.092.000	690.118.000	98,43%
				KIE Obat dan Makanan melalui Media Nasional	988.435.000	971.570.400	98,29%
				KIE Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor	1.492.150.000	1.488.579.000	99,76%
				Road Show Kepada Millennial tentang Obat dan Makanan	635.756.000	574.387.574	90,35%
				Kampanye HaloBPOM Bersama Tokoh Masyarakat	145.970.000	139.725.000	95,72%
				Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Bersama Tokoh Masyarakat	514.790.000	514.685.200	99,98%
				Promosi Informasi Obat dan Makanan Aman	307.105.000	303.449.000	98,81%
				Penyusunan Konten KIE Media Sosial, Media Cetak, dan Elektronik	252.760.000	250.386.000	99,06%
				Penyusunan Kajian KIE BPOM	208.160.000	191.434.000	91,96%
5	SS5. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	IK6- Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama			<b>4.402.061.000</b>	<b>4.303.509.996</b>	<b>97,76%</b>
			3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Integrasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran	184.682.000	176.268.500	95,44%
				Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM	241.468.000	240.430.000	99,57%
			4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM	599.596.000	598.736.200	99,86%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
			4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Koordinasi Lintas Sektor Kehumasan	164.494.000	133.131.899	80,93%
				Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi Sempel Lpk/Sub-Web Ulpk/Sub-Web Ppid	317.984.000	297.243.000	93,48%
			4112 Pengelolaan SDM BPOM	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	2.893.837.000	2.857.700.397	98,75%
6	SS6. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	IK7- Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan		<b>11.924.929.000</b>	<b>11.704.532.835</b>	<b>98,15%</b>
				Reviu Grand Design Pengawasan Obat Dan Makanan	251.400.000	239.030.801	95,08%
				Reviu Indikator Kinerja Utama BPOM	392.126.000	385.832.100	98,39%
				Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra BPOM 2020-2024	751.297.000	746.844.045	99,41%
				Penyusunan Rancangan Renstra BPOM 2020-2024	1.577.196.000	1.566.931.157	99,35%
				Pertemuan Penyusunan Perencanaan Tahunan	479.940.000	455.892.832	94,99%
				Workhop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat Dan Upt BPOM	1.066.190.000	1.056.908.000	99,13%
				Sosialisasi Dan Bimtek Penyusunan Rkaki Pagu Anggaran	1.078.080.000	1.067.222.000	98,99%
				Sosialisasi Dan Bimtek Penyusunan Rkaki Alokasi Anggaran	1.745.562.000	1.733.619.600	99,32%
				Penyiapan Bahan Dan Pengawasan Rdp Dengan Mitra Kerja Badan Pom	165.110.000	151.291.000	91,63%
				Koordinasi Penganggaran Dengan Lintas Sektor	249.361.000	222.121.800	89,08%
				Penyusunan Standar Biaya Keluaran(Sbk) Dengan Stakeholder	85.550.000	78.352.000	91,59%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Pertemuan Rekonsiliasi Hibah/Penganggaran Dengan Stakeholder	268.482.000	266.761.000	99,36%
				Monitoring Kegiatan PNBP Di Balai Pom Dalam Rangka Penyusunan Program PNBP 2019	75.340.000	68.000.000	90,26%
				Bimtek Kemandirian Loka Pom	784.791.000	783.498.800	99,84%
				Sosialisasi Program Dak Badan Pom Ke Kabupaten/ Kota	158.562.000	152.272.840	96,03%
				Unit Akuntansi Badan Pom	193.357.000	175.094.000	90,55%
				FGD Laporan Keuangan Badan Pom	683.060.000	635.795.901	93,08%
				Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018	31.916.000	31.850.150	99,79%
				Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pom Tahun 2018	175.514.000	175.394.050	99,93%
				Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2019 Di Surabaya	1.712.095.000	1.711.820.759	99,98%
7	SS7. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM				<b>10.027.133.000</b>	<b>9.853.380.697</b>	<b>98,27%</b>
		IK8- Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	4112 Pengelolaan SDM BPOM	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	1.628.549.000	1.599.385.222	98,21%
				Sewa Mesin Foto Copy	561.600.000	468.346.899	83,40%
				Pengadaan Barang Cetak	388.750.000	385.855.000	99,26%
		IK9- Persentase SDM BPOM yang memiliki	4112 Pengelolaan SDM BPOM	Analisa Jabatan Dan Evaluasi Jabatan	183.840.000	182.631.750	99,34%
				Penyusunan Dan Review Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan	185.370.000	185.020.050	99,81%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
		kinerja berkriteria baik		Pengadaan Cpns/Pppk	2.115.367.000	2.108.232.623	99,66%
				Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Pengawas Farmasi Dan Makanan	444.952.000	436.577.800	98,12%
				Pertemuan Dalam Rangka Reward And Punishment	507.616.000	502.528.714	99,00%
				Penyusunan Penilaian Kualitas Prestasi Kerja Kepala Balai Besar/Kepala Balai Pom	53.960.000	53.150.000	98,50%
				Koordinasi Persuratan Dan Kearsipan	96.944.000	93.188.800	96,13%
				Bimbingan Teknis Akreditasi Kearsipan Badan POM	418.447.000	415.333.848	99,26%
				Penilaian Kembali Arsip	97.220.000	96.868.400	99,64%
				Pemusnahan Arsip	88.180.000	87.705.930	99,46%
				Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Dan Supervisi Kearsipan	206.650.000	201.792.124	97,65%
				Sosialisasi Hasil Survey Opini Pegawai Dan Penyusunan Roadmap Program Engagement Pegawai	627.278.000	622.130.800	99,18%
				Pengisian Jabatan Struktural	535.200.000	534.900.050	99,94%
				Pembinaan Jabatan Fungsional	786.835.000	786.671.487	99,98%
				Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional	310.015.000	309.691.900	99,90%
				Jasa Pos/Giro/Sertifikat	788.360.000	781.369.300	99,11%
				Sewa Kotak Pos/Po Box	2.000.000	2.000.000	100,00%
8	SS8. Organisasi yang tepat fungsi,	IK10-Rasio tindak lanjut	4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan		<b>2.440.253.000</b>	2.397.474.142	98,25%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
	tepat proses, dan tepat ukuran	rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Penataan Dan Penguatan Organisasi	849.986.000	813.209.179	95,67%
				Penataan Tata Laksana	1.590.267.000	1.584.264.963	99,62%
9	SS9. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum				<b>6.532.246.000</b>	<b>6.469.725.070</b>	99,04%
		IK11- Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Penyelarasan dan Pengawasan Penyusunan NSPK/Peraturan Perundang-undangan terkait Obat dan Makanan	55.800.000	55.515.400	99,49%
				Kajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	457.240.000	453.945.700	99,28%
				Pembahasan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	392.240.000	391.192.299	99,73%
				Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	111.869.000	111.710.600	99,86%
				Pembahasan Masukan terhadap Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	2.107.389.000	2.071.459.200	98,30%
				Koordinasi Lintas Sektor (Eksternal dan Internal)	420.540.000	420.220.538	99,92%
				Kajian Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	16.650.000	11.150.000	66,97%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Finalisasi Draft Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	657.315.000	655.218.000	99,68%
				Pelaksanaan Operasional Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	23.617.000	98,40%
				Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	284.130.000	282.809.010	99,54%
				Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	120.000.000	119.200.000	99,33%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	222.900.000	221.285.900	99,28%
				Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan	195.341.000	192.617.900	98,61%
		IK12- Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Penanganan Perkara/Biaya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan BPOM	753.910.000	745.604.023	98,90%
				Pertimbangan Hukum Terkait Permasalahan Pengawasan Di Bidang Obat dan Makanan Yang Terjadi Di Lingkungan BPOM	237.717.000	239.933.900	100,93%
				Penyuluhan Hukum dan pembelajaran atas Perkara Hukum di Lingkungan Badan POM	182.225.000	181.941.800	99,84%
				Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Perkara/Gugatan Hukum BPOM atau Balai Besar/ Balai POM	292.980.000	292.303.800	99,77%
10	SS10. Meningkatnya kerja sama BPOM	IK13- Persentase	3158 Peningkatan Penyelenggaraan		<b>6.636.140.000</b>	<b>6.626.693.782</b>	<b>99,86%</b>

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
		kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Penyusunan Kajian, Posisi, dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	343.231.588	99,97%
				Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	1.198.676.882	99,98%
				Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	69.674.650	99,90%
				Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	173.073.133	99,92%
				Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	904.119.880	99,92%
				Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	546.918.086	99,93%
				Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	427.804.464	99,98%
				Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	90.070.832	99,97%
				Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	218.504.595	97,61%
				Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi MoU Dalam Negeri	1.156.975.000	1.156.879.820	99,99%
				Peningkatan Kapasitas Timor Leste/Pasifik	284.218.000	284.179.187	99,99%
				Peningkatan Kerja Sama dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	1.072.637.665	99,85%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Penyelenggaraan kerjasama dengan negara mitra Asia/Afrika	141.582.000	140.923.000	99,53%
11	SS11. Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen				<b>7.522.198.000</b>	<b>6.887.105.375</b>	<b>91,56%</b>
		IK14- Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Peliputan Kegiatan BPOM	1.056.040.000	1.049.108.742	99,34%
				Publikasi BPOM	1.264.610.000	1.268.723.935	100,33%
				Layanan Distribusi Konten Internasional OKI Meeting (tunggakan TA 2018)	198.000.000	198.000.000	100,00%
				Penerbitan Media Publikasi BPOM	2.043.862.000	1.434.710.500	70,20%
		IK15-Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon I	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Koordinasi Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	416.990.000	415.914.000	99,74%
				Representasi/Pelayanan/Pengawasan Pimpinan	1.965.880.000	1.961.510.773	99,78%
				Dukungan Substansi Pimpinan	226.925.000	226.757.840	99,93%
		IK16- Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Pembahasan dan Penyusunan Materi Knowledge-Based LPK dan Contact Center BPOM	110.757.000	104.623.000	94,46%
				Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	54.494.000	49.702.000	91,21%
				Evaluasi Pelaksanaan Operasional dan Koordinasi Pengaduan dan Informasi Masyarakat	16.100.000	12.909.000	80,18%
				Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	99.850.000	97.250.000	97,40%
				Operasional Layanan Humas dan Informasi	68.690.000	67.895.585	98,84%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%	
12	SS12. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019				<b>4.830.991.000</b>	<b>4.717.331.100</b>	<b>97,65%</b>	
		IK17-Nilai AKIP Sekretariat Utama	3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	242.378.774	99,78%	
				3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Internalisasi Kinerja Rorenkeu	436.800.000	424.438.440	97,17%
					Penataan Arsip	50.000.000	47.500.000	95,00%
					Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Biro Perencanaan Dan Keuangan	112.975.000	112.705.000	99,76%
					Pemeliharaan Bagian Bagian Evaluasi Dan Pelaporan	104.239.000	103.987.000	99,76%
					Pemeliharaan Bagian Perencanaan	78.620.000	78.620.000	100,00%
					Pemeliharaan Bagian Keuangan	72.500.000	71.350.000	98,41%
					Pemeliharaan Bagian Penganggaran	121.630.000	113.818.400	93,58%
					Penataan Arsip Biro Perencanaan Dan Keuangan	92.050.000	91.638.440	99,55%
					Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2018	9.490.000	9.489.500	99,99%
					Penyusunan Laporan Tahunan Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2018	9.500.000	9.489.000	99,88%
					Workshop Dan Bimtek Biro Perencanaan Dan Keuangan	677.874.000	676.797.092	99,84%
					4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta	Koordinasi Internal Dan Eksternal Bidang Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi Dan Tata Laksana Serta Tata Usaha	900.870.000	891.868.184

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
			Organisasi dan tata laksana	Operasional Pendukung Kegiatan Biro Hukum Dan Organisasi	220.992.000	218.936.920	99,07%
				Peningkatan Kinerja ASN Biro Hukum Dan Organisasi	59.360.000	54.910.000	92,50%
				Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran Biro Hukum Dan Organisasi	75.900.000	75.830.552	99,91%
				Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	145.130.000	144.440.000	99,52%
				Pembahasan Dan Penyusunan Kegiatan Biro Hukum Dan Organisasi	298.200.000	290.679.000	97,48%
				Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Biro Hukum Dan Organisasi	230.791.000	179.050.000	77,58%
		4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan		Sistem Manajemen Mutu Biro Humas Dan DSP	118.730.000	118.636.314	99,92%
				Dukungan Rumah Tangga Biro Humas Dan DSP	361.591.000	357.467.217	98,86%
				Peningkatan Kapasitas Dukungan Strategis Pimpinan	305.844.000	301.430.751	98,56%
		4112 Pengelolaan SDM BPOM		Monitoring Dan Evaluasi/Audit Internal Qms Biro Umum	97.821.000	94.718.516	96,83%
				Audit Surveilans Qms Biro Umum Dan SDM	7.175.000	7.152.000	99,68%
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>					<b>73.034.052.000</b>	<b>72.826.126.925</b>
1				Pembangunan Gedung D Badan POM	71.773.245.000	71.746.332.085	99,96%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2019

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
	SS3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	IK4-Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4112 Pengelolaan SDM BPOM	Renovasi Aula Gedung C (Sisa Pekerjaan 2018)	269.981.000	269.980.535	100,00%
Peningkatan Kapasitas Hydrant Dan Peningkatan Drainase Kawasan BPOM (Sisa Pekerjaan 2018)				138.000.000	137.467.961	99,61%	
Penataan Luar Gedung Kantor BPOM (Sisa Pekerjaan 2018)				169.536.000	164.658.774	97,12%	
Renovasi Halaman/Gorong-Gorong/Gedung				643.290.000	467.735.570	72,71%	
Pembuatan Papan Nama Tanah Kantor BPOM				40.000.000	39.952.000	99,88%	

## LAMPIRAN 10

## KERJA SAMA BPOM YANG SUDAH DIIMPLEMENTASIKAN TAHUN ANGGARAN 2019

## KERJA SAMA BILATERAL

- 1 Amerika: *US Food and Drug Administration (FDA), US Pharmacopeia (USP), US Department of Agriculture (USDA), Harvard Kennedy School (HKS), Michigan State University (MSU)*
- 2 Arab Saudi: *Saudi Food and Drug Administration (SFDA)*
- 3 Australia: *Therapeutic Goods Administration (TGA), Indonesia-Australia CEPA, Ministry of Primary Industries (MPI)*
- 4 Bangladesh: *Indonesia-Australia PTA*
- 5 Eropa: *Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA)*
- 6 India: *State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM), Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)*
- 7 Iran: *Iran Food and Drug Administration (IFDA), I-Iran Preferential Trade Agreement (I-I PTA)*
- 8 Jepang: *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), Japan International Cooperation Agency (JICA)*
- 9 Kazakhstan: *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME)*
- 10 Maroko: *Office National de Securite Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA)*
- 11 Mozambiq: *I-Mozambique PTA*
- 12 Nigeria: *dan National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)*
- 13 Palestina: *Ministry of Health of Palestine*
- 14 Timor-Leste: *The Inspection and Supervision Authority for Economic, Health, and Food Activity (AIFAESA)*
- 15 Tunisia: *I-Tunisia PTA*
- 16 Turki: *I-Turkey CEPA*
- 17 Ukraina: *State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC), National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME)*

## KERJA SAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL

- 1 APEC-LSIF RHSC (*Life Science Innovation Forum and Convergence - Regulatory Harmonization Steering Committee*)
- 2 ACCSQ PPWG (*Pharmaceutical Product Working Group*)
- 3 ACCSQ TMHS-PWG (*Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group*)
- 4 ACCSQ PFPWG (*Processed Food Product Working Group*)
- 5 ASEAN Health Cluster 3 (AHC 3) - *Strengthening Health Systems and Access to Care*

- 6 ASEAN Health Cluster 4 (AHC 4) - *Ensuring Food Safety*
- 7 ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)
- 8 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)
- 9 *Non-Tariff Measures* (NTMs)
- 10 *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)
- 11 *World Health Organization* (WHO)
- 12 *Member States Mechanism of Substandard and Falsified Medical Products* (MSM SFMP)
- 13 *Benchmarking*
- 14 *World Health Assembly* (WHA)
- 15 Pembahasan *Concept Paper WHO-Listed Authority* (WLA)
- 16 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
- 17 *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S)
- 18 *Codex Committee Contaminant in Food* (CCCF), *Codex Committee on Food Additives* (CCFA), *Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses* (CCNFSDU), dan *Codex Committee on Food Labelling* (CCFL)
- 19 Technical Barriers to Trade (TBT)

#### **KERJA SAMA DALAM NEGERI**

- 1 MoU Wirawati Catur Panca
- 2 MoU Lembaga Administrasi Negara
- 3 PKS Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
- 4 KPID Provinsi Riau
- 5 Universitas Tanjung Pura
- 6 Universitas Padjajaran
- 7 Bank Mandiri
- 8 Kwartir Daerah Sumatera Barat
- 9 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau
- 10 Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia
- 11 Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- 12 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo
- 13 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulau Morotai
- 14 Universitas Adiwangsa Jambi (Rektor)
- 15 Universitas Adiwangsa Jambi (Dekan Fak. Farmasi)
- 16 Badan Pusat Statistik
- 17 Pemerintah Kabupaten Bangka
- 18 Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura
- 19 Institut Pertanian Bogor
- 20 Bina Insan Gemilang Indonesia Foundation (BIG Indonesia)
- 21 Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat

- 22 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak
- 23 PKS Institut Teknologi Bandung
- 24 Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
- 25 Dharma Wanita Persatuan
- 26 PKS Wirawati Catur Panca
- 27 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 28 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo
- 29 Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU)
- 30 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
- 31 Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Kesehatan)
- 32 Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir
- 33 Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun)
- 34 Kementerian Agama
- 35 Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)
- 36 PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK)
- 37 PT. Media Dokter Investama (HALODOC)
- 38 PT. Bukalapak.com
- 39 PT. Medika Komunika Teknologi (KLIKDOKTER)
- 40 Tokopedia
- 41 Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Ketahanan Pangan)
- 42 MoU Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)
- 43 PKS Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)
- 44 Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia
- 45 MoU Yayasan Puteri Indonesia
- 46 PKS Yayasan Puteri Indonesia
- 47 Universitas Airlangga
- 48 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dinas Kesehatan)
- 49 AKAFARMA Aceh
- 50 PKS BIN





Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



@bpom\_ri



Bpom RI